

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI UPAYA PENDIDIKAN UNTUK PEMILIH

(Studi Pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**YUDHA ADITYA PRATAMA
145030101111012**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

“Man Jadda wa Jadda”

“Lakukanlah yang terbaik dengan usahamu sendiri, sesungguhnya Allah tidak buta dan tidak tidur”

IBU



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai
Upaya Pendidikan Untuk Pemilih (Studi Pada Rumah
Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)

Disusun oleh : Yudha Aditya Pratama

NIM : 145030101111012

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 14 Mei 2018

Komisi Pembimbing,

Ketua

Anggota



Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP
NIP. 19810210 200501 2 002



Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP
NIP. 19840713 201504 1 004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia jika skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 14 Mei 2018

Mahasiswa



Yudha Aditva Pratama
NIM.145030101111012

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Juni 2018
Waktu : 11.00 – 12.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Yudha Aditya Pratama
Judul : Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai
Upaya Pendidikan Untuk Pemilih (Studi Pada Rumah
Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)

Dan dinyatakan LULUS

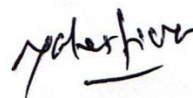
MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP
NIP. 19810210 200501 2 002



Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP
NIP. 19840713 201504 1 004

Anggota



I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D.
NIP. 2011078312041000

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada keluarga besar penulis, khususnya kedua orang tua tercinta yakni Bapak Isdiarto dan Ibu Suwanti yang selalu bekerja keras dalam menghidupi, mengajarkan, mendoakan, dan memberikan yang terbaik untuk kesuksesan anak-anaknya di dunia maupun akhirat. Terima kasih juga untuk adik-adik saya, Aji Sadewo dan Salsabila Cahya Iswanti yang selalu menyemangati dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih teruntuk Nur Alfiani, karena berkat dukungan dan doanya penulis bersemangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

RINGKASAN

Yudha Aditya Pratama, 2018. **Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Upaya Pendidikan Untuk Pemilih (Studi Pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)**. Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP dan Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP. 150 hal + xvi

Penelitian ini di latangbelakangi oleh program Rumah Pintar Pemilu yang diciptakan oleh KPU RI untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara mengedukasi masyarakat tentang kepemiluan dan demokrasi. Dengan Surat Edaran KPU No. 86/HM.03.5-SD/06/KPU/I/2018, KPU RI memerintahkan seluruh KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk menciptakan Rumah Pintar Pemilu. Begitupun dengan KPU Kota Batu, dimana Rumah Pintar Pemilu yang sudah diwujudkan hanya direalisasikan satu kali. Rumah Pintar Pemilu di Kota Batu penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang terus menurun pada setiap pelaksanaan pemilu di Kota Batu. Karena itu teori Implementasi menjadi hal yang digunakan untuk meninjau sejauh mana implementasi program Rumah Pintar Pemilu berjalan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Batu, sedangkan situsnya berada di KPU Kota Batu. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari beberapa wawancara yang dilakukan dengan informan yang berkaitan, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Rumah Pintar Pemilu belum berjalan dengan maksimal dengan kendala bahwa belum adanya SOP untuk menjalankan program ini, sumber daya yang digunakan juga belum memadai baik dari keuangan, sarana dan prasarana, dan manusia. Dengan hal tersebut membuat realisasi kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan menjadi tidak dapat tersalurkan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Pemilih, Rumah Pintar Pemilu.

SUMMARY

Yudha Aditya Pratama, 2018. **Implementation of Rumah Pintar Pemilu Program As Education Efforts For Voters (This research was conducted on Rumah Pintar Pemilu Owned KPU of Batu City)**. Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP and Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP. 150 pages + xvi.

The background of this research is Rumah Pintar Pemilu program made by KPU RI to increase political participation by educating people about elections and democracy. With a warrant from the KPU No. 86/HM.03.5-SD/06/KPU/I/2018, KPU RI ordered to all KPU of regency or city throughout Indonesia to create Rumah Pintar Pemilu. Likewise with KPU of Batu City, where Rumah Pintar Pemilu that have been implemented only realized once. Rumah Pintar Pemilu in Batu City is very important to increase the political participation of the people which continues to decline in every election in Batu City. Therefore Implementation theory becomes the thing used to review the extent to which the implementation of the Rumah Pintar Pemilu program runs.

This research uses descriptive research type with qualitative approach located in Batu City, which is the location of the site is in KPU of Batu City. In conducting this study the authors used the primary data obtained from several interviews conducted with related infroman, and secondary data sources obtained from documents relating to the research topic. Data collection techniques were obtained through interviews, observation and documentation. While the research instrument is the researcher himself and some supporting tools such as interview guides, and other aids.

The results of this study show that Rumah Pintar Pemilu program has not run with the maximum with the constraints that the absence of SOP to run this program, the resources used are also insufficient both from finance, facilities and infrastructure, and human resource. By doing so make realization to the society to achieve the purposed goals become unable to channel properly.

Key Words: Implementation, Voters Education, Rumah Pintar Pemilu.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Upaya Pendidikan Untuk Pemilih (Studi Pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada Prodi Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Fadillah Amin, Dr., M. AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan bagi penulis.

5. Bapak Nana Abdul Aziz, S.AP, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Isdiarto dan Ibu Suwanti sebagai orang tua yang selalu mendoakan, menyemangati, dan memberikan pengarahan bagi penulis.
8. Aji Sadewo dan Salsabila Cahya Iswanti sebagai adik-adik yang selalu menyemangati, dan menebarkan senyum kepada penulis.
9. Mbah Antiyem sebagai nenek tercinta yang selalu mendoakan, menyemangati dan menanti kehadiran penulis di rumah.
10. Nur Alfiani sebagai penyemangat yang tidak pernah henti dan bosan memberikan hal-hal yang positif untuk penulis.
11. Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu yang senantiasa memberikan informasi bagi penulis selama penelitian berlangsung.
12. Bapak Ariansyah Mustafa selaku Kasubag Teknis KPU Kota Batu yang senantiasa memberikan informasi bagi penulis selama penelitian berlangsung.
13. Para Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Batu yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
14. Teman-teman terbaik kosan badut bahagia, Aditya Bembeng, Reza Imam, Zaenaldi Ibrahim, Rendy Kompeng, Ranu Aryandra, Shesa Hernanda, dan

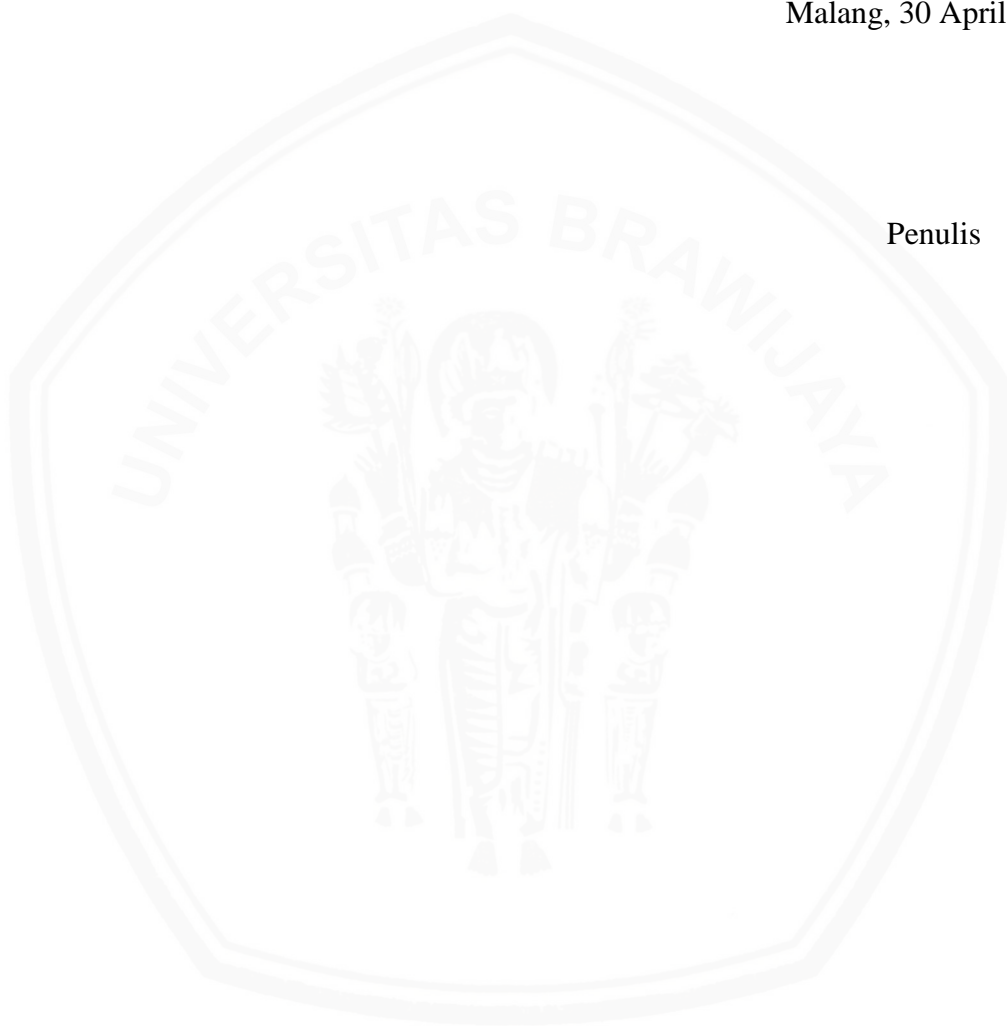
Reza Sutowo yang telah memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.

15. Teman-teman terbaik kontrakan sakura, Irfan Maulana, Muhamad Room Chaidir, dan Septyan Eka Buchari, Danang Ridho Subekti yang telah memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
16. Teman-teman terbaik Geng Kawan Lampau, Suryo Dewo, Mohamad Bagus Wibowo, Alfarisi Difa Utama, Ryan Nicky yang telah memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
17. Teman-teman terbaik semasa perkuliahan Yusuf Ilham Ramadhoni, Bayu Adi Pratama, Seha Dwi, Offenade, Haidar Fakhri, Muhammad Yusuf Syahputra, Nico, Lutfi Kamil, Gilang, Inan, Adit, dan Regha, Adit Bongki, Samuel S yang telah memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
18. Teman-Teman SMAN 44 Jakarta Timur, Abdul Aziz, Panji Ismail, Dikry Ahmad Jaya, dan Andreas Lamhot yang telah memberikan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini.
19. Teman-teman semua mahasiswa administrasi publik angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas semangat yang diberikan dalam proses pembuatan skripsi ini dan sukses untuk kita semua.
20. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 30 April 2018

Penulis

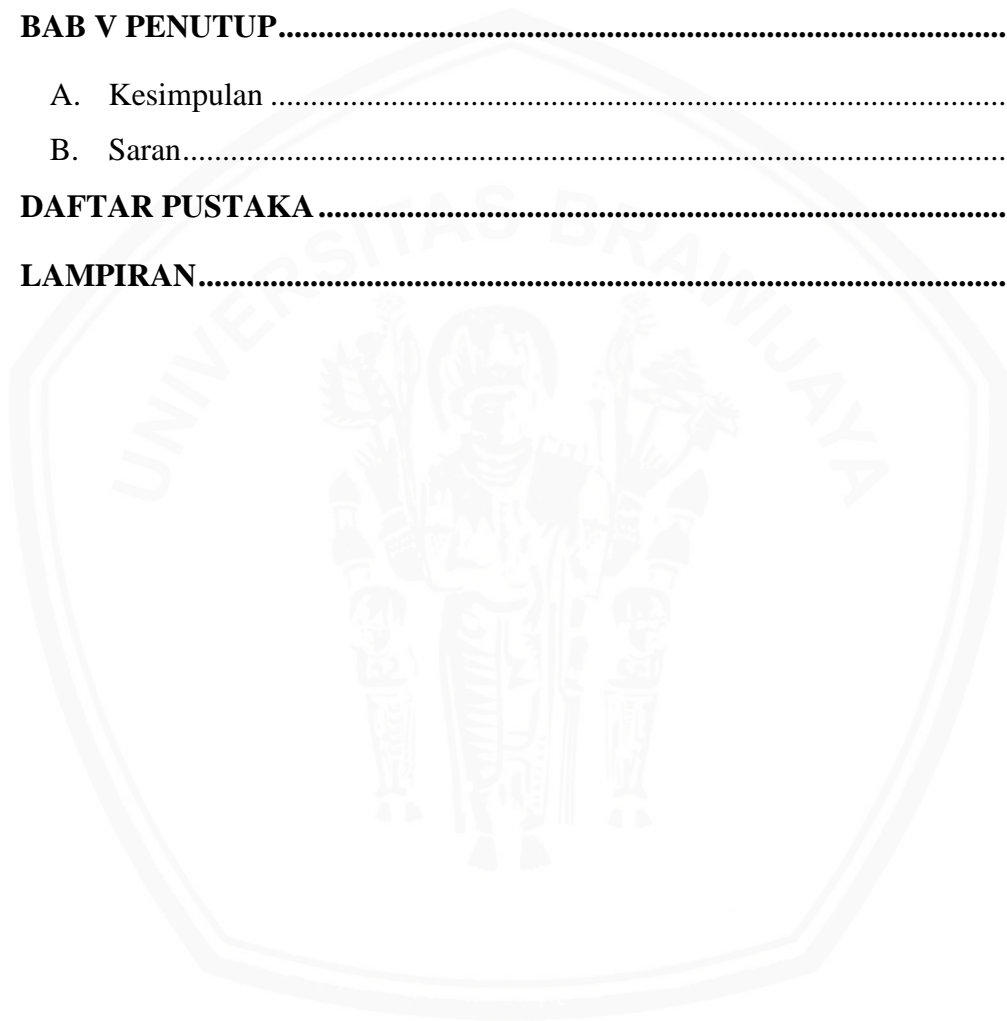


DAFATAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFATAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian.....	9
E. Sistematika Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
A. Pelayanan Publik.....	12
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	12
2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik	14
3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.....	15
B. Kebijakan dan Program.....	17
1. Pengertian Kebijakan	17
2. Pengertian Program.....	21

C. Implementasi Kebijakan.....	23
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	23
2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan	25
3. Implementasi Program dalam Konsep Implementasi Kebijakan.....	29
D. Pendidikan Pemilih	31
1. Pengertian Pendidikan Pemilih	31
2. Tujuan Pendidikan Pemilih.....	32
3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Pemilih	33
4. Kelompok Sasaran	34
E. Rumah Pintar Pemilu (RPP)	38
1. Konsep Rumah Pintar Pemilu.....	38
2. Materi Rumah Pintar Pemilu	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Fokus Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Metode Analisis	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Kota Batu.....	52
1. Gambaran Umum Kota Batu	52
2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu	59
B. Penyajian Data	69
1. Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya Pendidikan untuk Pemilih milik KPU Kota Batu	69
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya Pendidikan untuk Pemilih milik KPU Kota Batu	107

C. Pembahasan.....	116
1. Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya Pendidikan untuk Pemilih milik KPU Kota Batu	117
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya Pendidikan untuk Pemilih milik KPU Kota Batu	140
BAB V PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN.....	156



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pemilih Kota Batu Berdasarkan Kecamatan	6
Tabel 2. Angka Partisipasi Politik Masyarakat Kota Batu.....	6
Tabel 3. Luas pembagian Wilayah Kota Batu	54
Tabel 4. Keseluruhan/Desa yang ada di Kota Batu.....	55
Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Batu	56
Tabel 6. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama	57
Tabel 7. Daftar Nama Komisioner KPU Kota Batu Masa Bakti 2014-2019	66
Tabel 8. Daftar Nama Pegawai KPU Kota Batu	67
Tabel 9. Daftar Nama Tenaga Honorer KPU Kota Batu	69
Tabel 10. Jumlah Pemilih Pemula di Kota Batu	80
Tabel 11. Sarana Rumah Pintar Pemilu	85
Tabel 12. Kondisi Kepegawaian KPU Kota Batu Menurut Latar Belakang Pendidikan	91
Tabel 13. Daftar Sekolah yang Pernah Berkunjung	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Sekuensi Implementasi Kebijakan	30
Gambar 2. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif	50
Gambar 3. Peta Kota Batu.....	53
Gambar 4. Struktur Organisasi KPU.....	65
Gambar 5. Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu.....	74
Gambar 6. <i>Launching</i> Rumah Pintar Pemilu	75
Gambar 7. <i>KPU Go To School</i>	76
Gambar 8. Anggaran Rumah Pintar Pemilu.....	83
Gambar 9. Banner Informasi Pemilu	86
Gambar 10. Maket TP	86
Gambar 11. Buku-buku Mengenai Pemilu.....	87
Gambar 12. Ruang <i>Audio Visual</i> Menjadi Ruang Kerja Komisioner	89
Gambar 13. Ruang Simulasi Menjadi Ruang Rapat	89
Gambar 14. <i>Launching</i> Rumah Pintar Pemilu	100
Gambar 15. Alur Kunjungan Rumah Pintar Pemilu	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang demokrasi. Masyarakat umum menafsirkan demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejalan dengan penafsiran masyarakat umum tentang demokrasi Soche (dalam Winarno, 2014:100) mengatakan, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat, karena kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang disertai memerintah. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat.

Wujud dari sistem demokrasi adalah pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi (Bachtiar, 2014:3). Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia berlandaskan hukum kepada peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dengan Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU dibentuk pada tahun 1999 oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Adapun Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum mengatakan tugas kewenangan dari KPU adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menetapkan dan meneliti partai-partai politik yang berhak menjadi peserta pemilu, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat dan daerah sampai di tempat pemungutan suara (TPS), menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan, menetapkan hasil seluruh pemilu di semua daerah pemilihan, mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilu, dan memimpin tahapan kegiatan pemilu.

KPU sebagai lembaga negara yang diberikan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan pemilu juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ilmu administrasi, Indradi (2016:2) mengemukakan bahwa administrasi (dalam bahasa latin) berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepadanya. Selaras dengan pernyataan tersebut, terdapat tiga bentuk pola pelayanan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu, (1) Kelompok Pelayanan Administratif, (2) Kelompok Pelayanan Barang, (3) Kelompok Pelayanan Jasa. Salah satu pelayanan publik

yang dilakukan oleh KPU adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilihan dan demokrasi. Menurut salah satu Komisioner KPU Kota Batu, tugas KPU selain menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat (Saifudin Zuhri, 26 Februari 2018).

Pendidikan dalam sudut pandang penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu/pemilihan dilaksanakan. Pendidikan pemilih sendiri menurut KPU RI adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian (KPU RI, 2015). Pentingnya pendidikan pemilih menurut KPU RI (dalam Buku Pendidikan Pemilih, 2015:3) karena beberapa alasan, yaitu membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, dan memperkuat sistem demokrasi. Menyelenggarakan pendidikan pemilih bukanlah hanya tanggung jawab dari KPU, melainkan juga tanggung jawab semua elemen bangsa seperti partai politik, pemerintah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Sejalan dengan hal tersebut salah satu Komisioner KPU Kota Batu mengatakan,

“pendidikan pemilih itu sangat penting, karena dengan masyarakat mendapatkan pendidikan pemilih maka akan tertanam nilai-nilai demokrasi, lebih mengetahui tentang pemilu, dengan begitu kesadaran politiknya akan meningkat dan akan mengurangi kecurangan pemilu

seperti *money politic* dan juga golput. Dengan demikian akan menjadikan suatu hasil pemilu yang berintegritas” (Saifudin Zuhri, 26 Februari 2018).

Salah satu prinsip dari pendidikan pemilih adalah berkesinambungan. Maksud dari berkesinambungan yaitu pelaksanaan pendidikan pemilih dilakukan pada masa periode pemilihan dan masa luar periode pemilihan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa pemilihan. Makna lain dari berkesinambungan adalah pendidikan pemilih bukan kegiatan yang sekali dilakukan setelah itu selesai namun ada aktivitas lanjutan yang dikreasi untuk membentuk sikap dan perilaku dari pemilih. Pernyataan ini didukung oleh Kepala Divisi Sosialisasi KPU Bukittinggi yaitu Benny Aziz (dalam harianhaluan.com), beliau mengatakan “keberadaan Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat mendorong terselenggaranya pendidikan bagi pemilih secara berkelanjutan”

Menanggapi dari pemaparan sebelumnya KPU RI (dalam Buku Pendidikan Pemilih 2015:24) mengatakan terdapat 5 (lima) strategi dalam program pendidikan pemilih ini, yaitu Penggunaan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Media Massa, Lembaga Pendidikan, Pemanfaatan Aktivitas Sosial Budaya, Komunitas Hobby, Rumah Pintar Pemilu, Relawan Demokrasi, dan Kreasi Lain. Dari beberapa program yang ada Rumah Pintar Pemilu (RPP) adalah program prioritas nasional. Rumah Pintar Pemilu merupakan realisasi dari tujuan KPU RI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2017 melalui Surat Edaran No. 54/KPU/I/2017 tentang pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017 menginstruksikan kepada seluruh KPU kabupaten/kota di Indonesia untuk

membuat Rumah Pintar Pemilu dengan konsep pendidikan melalui pemanfaatan ruang. Seiring berjalannya waktu KPU RI menjadikan Rumah Pintar Pemilu ini menjadi program prioritas nasional terkait pendidikan pemilih untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019, keterangan ini tertuang pada Surat Edaran KPU No. 86/HM.03.5-SD/06/KPU/I/2018, tanggal 24 Januari 2018 “Perihal Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2018”. Salah satu isi dari surat ini adalah “KPU akan membentuk Rumah Pintar Pemilu di 223 (dua ratus dua puluh tiga) KPU/KIP Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan surat edaran tersebut KPU Kota Batu juga termasuk dalam daftar 223 KPU yang ikut membuat Rumah Pintar Pemilu yang diberi nama “Wisata Demokrasi” dan diresmikan langsung oleh Walikota Batu pada saat itu Eddy Rumpoko pada tanggal 13 September 2017 (*website* KPU Kota Batu). Mengutip dari *website* KPU Kota Batu, dalam sambutannya Eddy Rumpoko mengatakan “Rumah Pintar Pemilu harus bisa memberikan pengetahuan pendidikan politik yang lengkap seputaran pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang serta diharapkan Rumah Pintar Pemilu bisa didirikan di tempat-tempat wisata yang ada di kota Batu dengan harapan masyarakat menghilangkan rasa enggan atau sungkan untuk masuk dan belajar”. Jumlah pemilih di Kota Batu sendiri berjumlah 150.059 orang dengan rincian seperti berikut:

Tabel 1. Jumlah Pemilih Kota Batu Berdasarkan Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih		
		L	P	L+P
1.	BATU	34.471	34.660	69.131
2.	BUMIAJI	22.351	22.133	44.484
3.	JUNREJO	17.783	18.607	36.444
TOTAL		74.659	75.400	150.059

Sumber: Data KPU Kota Batu

Secara umum tujuan dari program Rumah Pintar Pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu dan menjadi pusat informasi kepemiluan. Angka partisipasi politik di Kota Batu apabila dilihat dari Pileg 2014, Pemilu 2014, dan Pilkada 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Angka Partisipasi Politik Masyarakat Kota Batu

Penyelenggaraan Pemilu	Partisipasi Politik (%)
Pileg 2014	82,50
Pemilu 2014	81,72
Pilkada 2017	80,90

Sumber: Data KPU Kota Batu

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap adanya penyelenggaraan pemilu di Kota Batu partisipasi politik masyarakat Kota Batu menurun, untuk itu perlu adanya program Rumah Pintar Pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu. Sedangkan, tujuan khusus dari Rumah Pintar Pemilu adalah mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara, memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan

demokrasi (pra pemilihan), meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen), menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen). Apabila dilihat dari pemaparan tersebut pentingnya pendidikan pemilihan melalui Rumah Pintar Pemilu masyarakat akan dapat mempunyai kesadaran politik atau melek politik, mempunyai nilai-nilai demokrasi untuk kehidupan sehari-hari, dan mengetahui banyak hal tentang pemilu.

Namun pada kenyataannya realisasi program Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Batu dilakukan hanya sekali dalam kurun waktu lima bulan setelah peresmian. Jika dilihat dari seluruh pemaparan diatas dapat disimpulkan pentingnya Rumah Pintar Pemilu untuk mengdukasi para pemilih tentang kepemiluan dan demokrasi namun realisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu untuk memberikan edukasi kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat belum maksimal hanya diawal peresmian saja. Apabila dilihat dari Buku Pendidikan Pemilih milik KPU RI yang tertuang pada prinsip-prinsip pendidikan pemilih salah satunya adalah berkesinambungan. Dalam hal ini seharusnya KPU Kota Batu melakukan pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu saat masa pemilu maupun diluar masa pemilu. Ditambah dengan tanggal 27 Juni 2018 akan diadakan Pilkada serentak dimana masyarakat kota Batu juga akan melakukan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana rangkaian proses pelaksanaan program KPU Kota Batu yaitu Rumah Pintar Pemilu, dengan mengangkat judul **“Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya Pendidikan untuk Pemilih (Studi Pada Program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan dan menganalisa mengenai:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih melalui milik KPU Kota Batu.
2. Mendeskripsikan dan menganalisa apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademik maupun praktis:

1. Kontribusi Akademik

- a. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam mengetahui implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih.

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai bahan untuk mengembangkan keberlanjutan dari implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan rangkaian antara bab yang satu dengan bab lainnya. Secara garis besar uraian dari sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan mengacu hal mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini terdapat pemaparan mengenai beberapa konsep kajian dan kajian pustaka atau kajian teori yang akan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa kajian teori yaitu Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat pengertian pelayanan, pengertian pelayanan publik, bentuk-bentuk pelayanan publik, dan prinsip pelayanan publik. Lalu Kebijakan dan Program, elain itu penulis juga menggunakan teori Implementasi Kebijakan. Setelah itu terdapat penjelasan tentang Pendidikan Pemilih dan penjelasan tentang Rumah Pintar Pemilu

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis.

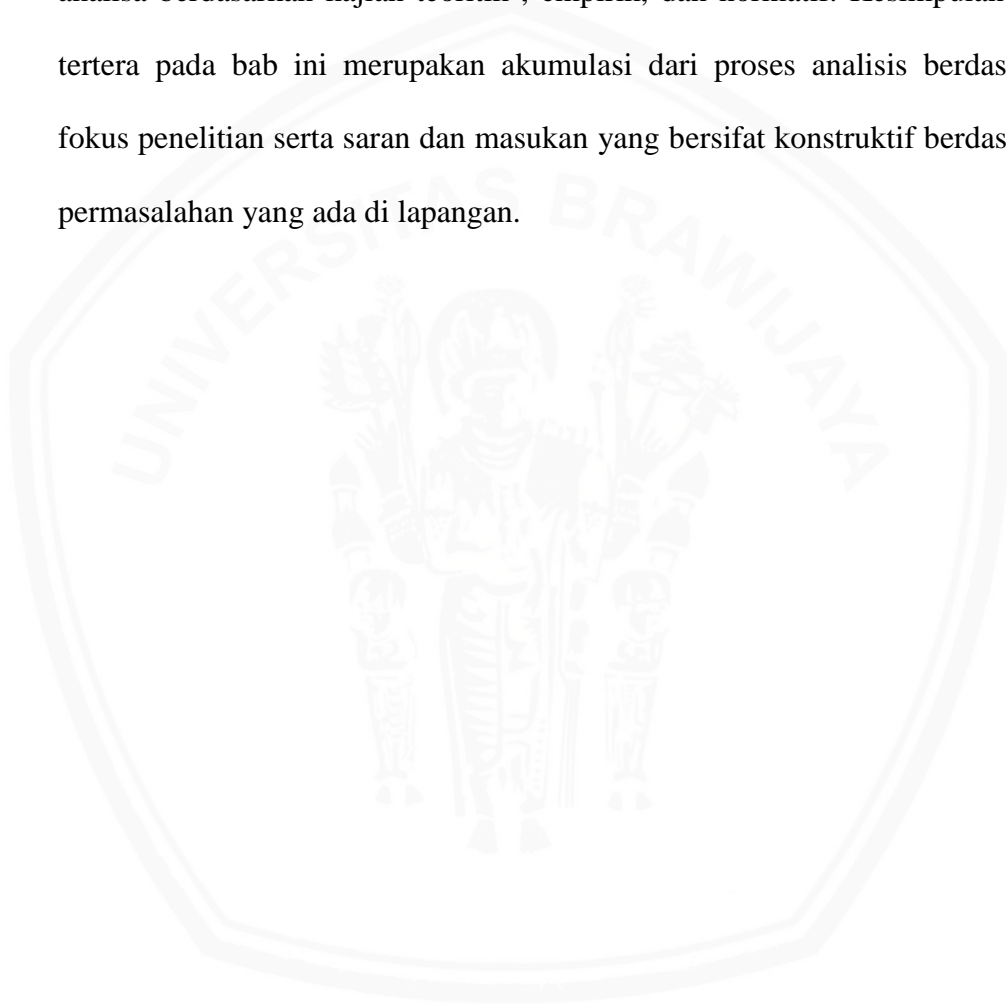
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian di lapangan serta menyajikan data primer dan data sekunder yang telah terhimpun oleh peneliti

pada saat terjun ke lapangan. Penyajian data yang disajikan mengacu pada rumusan masalah sesuai dengan fokus penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penyajian data serta analisa berdasarkan kajian teoritik , empirik, dan normatif. Kesimpulan yang tertera pada bab ini merupakan akumulasi dari proses analisis berdasarkan fokus penelitian serta saran dan masukan yang bersifat konstruktif berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan pada perkembangannya berawal dari sektor bisnis diadopsi oleh sektor publik. Definisi pelayanan sendiri menurut Moenir (2015:16) adalah sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui akitiftas orang lain yang langsung. Selaras dengan Moenir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993) dalam Pasolong (2008:128) mengatakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa pengertian pelayanan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan adalah aktifitas memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat dalam bentuk kegiatan pelayanan barang atau jasa. Sedangkan publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).

Pelayanan publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara perbuatan melayani orang banyak (umum). Terdapat banyak definisi mengenai pelayanan publik yang telah dikemukakan oleh para ahli. Selanjutnya Kurniawan (dalam Pasolong, 2008:128), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah diciptakan.

Di Indonesia pelayanan publik juga diperkuat dengan peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Selain itu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sejalan dengan peraturan diatas Sinambela (2008:5) mengartikan pelayanan publik,

“setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan sekaligus memberi pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan dan tata cara yang ada dalam perundang-undangan.

2. Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik

Terdapat tiga bentuk pola pelayanan menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu :

- a. Kelompok Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Akte Kematian, Sertifikat Kepemilikan Tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.
- b. Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, jalan raya, dan sebagainya.
- c. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, dan sebagainya.

3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah terlebih dahulu harus memahami prinsip-prinsip yang terdiri dari :

a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan

- 1) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- 2) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- 3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

h. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah.

B. Kebijakan dan Program

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Thomas R Dye (1995) dan James Anderson (1984) dalam Agustino (2008:4) ada tiga alasan yang melatar belakangi mengapa kebijakan publik perlu dipelajari. Pertama, pertimbangan atau alasan ilmiah (*scientific reasons*). Kebijakan publik perlu dipelajari dalam rangka untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam. Mulai dari asalnya, prosesnya, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Dimana pada gilirannya hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan ilmiah, kebijakan publik dapat dipandang baik sebagai variable dependen maupun variable independen. Dikatakan sebagai variable dependen manakala perhatiannya tertuju pada faktor politik dan lingkungan yang mempengaruhi atau menentukan konten kebijakan.

Kedua, pertimbangan alasan professional (*professional reasons*). Don K Price dalam Agustino (2008:5) memberikan pemisahan antara *scientific estate* yang hanya mencari kepentingan ilmu pengetahuan dengan *professional estate* yang berusaha menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial serta praktis. Jika dalam bahasan sederhana studi kebijakan digunakan sebagai alas untuk menerapkan pengetahuan ilmiah dalam rangka memecahkan masalah sehari-hari. Ketiga, pertimbangan atau alasan politis (*political reasons*). Kebijakan publik dipelajari pada dasarnya agar setiap perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan

yang sesuai target. Pertimbangan ini pula yang membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan yang benar.

Seiring dengan berbagai fenomena dan kegiatan yang terjadi dalam pemerintahan pengertian dan substansi tentang kebijakan publik secara langsung ataupun tidak langsung telah dikenal luas di masyarakat. Beragam pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai kebijakan publik. Salah satunya, Thomas R. Dye (1995) dalam Agustino (2014:7) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments chooses to do or not to do*” artinya kebijakan publik adalah apa yang pemerintah publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pengertian ini menunjukkan pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pilihan terhadap kebijakan mana yang akan dilakukan atau tidak, tergantung pada permasalahan yang timbul atau capaian yang ingin dituju dari kebijakan yang rumuskan tersebut. Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Fridrich (1969) dalam Agustino (2014:7) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud

dan tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.

Lebih lanjut, Agustino (2008:8), mengatakan karakteristik dari pendefinisian kebijakan publik:

- a. Kebijakan publik perhatiannya ditunjukkan kepada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah.
- c. Kebijakan adalah apa yang sesungguhnya benar-benar dikerjakan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dikerjakan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik

(Young dan Quinn, 2002) dalam Suharto (2008:44-45):

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial.
- b. Sebuah relaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah dan kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor.

Dari sejumlah definisi mengenai kebijakan publik yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau proses dalam mengatasi masalah publik yang di dalamnya mengandung konsep atau nilai-nilai yang selaras dengan konsep dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan publik disusun melalui tahapan-tahapan tertentu, dimana terdapat seorang atau sekumpulan aktor disetiap tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn (2003:26) dalam tahapan-tahapan kebijakan publik terdiri dari:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

e. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2. Pengertian Program

Berbagai pemikiran tentang program pembangunan, dapat diketahui bahwa program disamping bersifat alokatif dan diskriptif, program juga bersifat inovatif dan multi fungsi. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh United Nations (dalam Zauhar 1993:2) bahwa, "*Programme is a taken to mean form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an organizations and activities*". Dapat disimpulkan bahwa program adalah bentuk kegiatan yang terorganisir yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batasan dalam waktu dan jangkauan yang dilakukan oleh serangkaian kegiatan dari organisasi.

Hadirnya program untuk mencoba memecahkan suatu permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan yang ada. Program selain untuk memecahkan masalah (*problem solving*) berguna untuk membangkitkan motivasi dan inovasi. Agar fungsi program berjalan dengan baik maka suatu program harus memiliki ciri-ciri:

1. Tujuan yang dirumuskan jelas;
2. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan;
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program selektif mungkin;
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut;
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri;
6. Berbagai upaya di bidang manajemen termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. (United Nation, dalam Zauhar 1993:2)

Menurut KBBI program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha usaha yang akan dijalankan. Program merupakan langkah untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan yang sudah ditetapkan. Dari pernyataan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah sebuah tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu atau pejabat untuk mencapai tujuan, melalui beberapa program sebagai langkah pencapaian tujuan.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak dari adanya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2008:65) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat (atau kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari pengertian Van Meter dan Van Horn yang dimaksud dengan tindakan tersebut adalah mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Implementasi pada sudut pandang teori Van Meter dan Van Horn merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Dari pernyataan Van Meter dan Van Horn dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah melakukan

sesuatu hal yang untuk tercapainya tujuan-tujuan kebijakan dan menimbulkan dampak atau perubahan terhadap sesuatu.

Kebijakan berasal secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris “*Policy*”. Anderson (dalam Wahab, 2008:2) merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan selalu berhubungan dengan dorongan dan peraturan. Sedangkan program adalah bentuk dari kebijakan yang akan diaplikasikan kepada masyarakat. Widodo (2010:85) mengatakan bahwa:

“implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik adalah studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan.”

Berhubungan dengan pernyataan diatas menurut Jones (dalam Widodo, 2010:86) pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut dengan *resource*. Berdasarkan pemaparan yang ada dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan dalam proses kebijakan yang perlu direncanakan dengan pertimbangan sumber daya secara baik agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana program kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Selaras dengan hal tersebut Widodo (2010:88) pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*output*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*), serta dampak (*impacts*) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Dari beberapa pengertian diatas mengenai implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu aktivitas atau kegiatan yang dijalankan untuk merealisasikan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan akan menimbulkan suatu dampak untuk kelompok sasaran, yang kemudian menjadi bahan untuk mengukur dan menjelaskan pencapaian dari kebijakan itu sendiri. Penelitian ini bermaksud untuk mendiskripsikan, menjelaskan dan menganalisis proses implementasi dan faktor pendukung serta faktor penghambat dari program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu.

2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Jones dalam Widodo (2010:89) mengemukakan bahwa tahapan dalam aktivitas implementasi kebijakan terdiri dari tiga macam yaitu pengorganisasian (*organization*), interpretasi (*interpretation*) dan aplikasi (*application*). Adapun ketiga tahapan tersebut kemudian dijabarkan secara lebih luas dan rinci oleh Widodo (2010:90) sebagai berikut:

a. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*)

akan dijabarkan dalam kebijakan manajerial (*manajerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*). Kebijakan umum atau kebijakan strategi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (bupati atau walikota) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan, atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.

b. Tahap Pengorganisasian (*to Organization*)

Tahapan yang lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan terhadap lima hal, antara lain:

1) Pelaksana Kebijakan

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Dinas, badan, kantor, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah,
- b) Sektor swasta,
- c) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
- d) Komponen Masyarakat.

2) *Standard Operating Procedure* (SOP)

SOP merupakan pedoman, petunjuk, tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan agar para pelaku tersebut dapat mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang perlu dibuat prosedur tetap (Protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM). Semakin jelas SOP pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para pelakku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik yang menyangkut tujuan, arah, kelompok sasaran, hasil apa yang dapat dicapai atau

dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan.

3) Sumber Daya

Langkah selanjutnya adalah penetapan sumber daya anggaran sesuai dengan macam dan jenis kebijakan dan sumber anggaran yang dapat berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain. Demikian pula peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan karena macam, jenis dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Selain anggaran dan peralatan yang harus diperhatikan juga sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini yang harus diperhatikan untuk sumber daya manusia adalah kuantitas, dan kualitasnya. Selain itu Edward III (dalam Widodo 2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

5) Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal kegiatan menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

c. Tahap Aplikasi (*Application*)

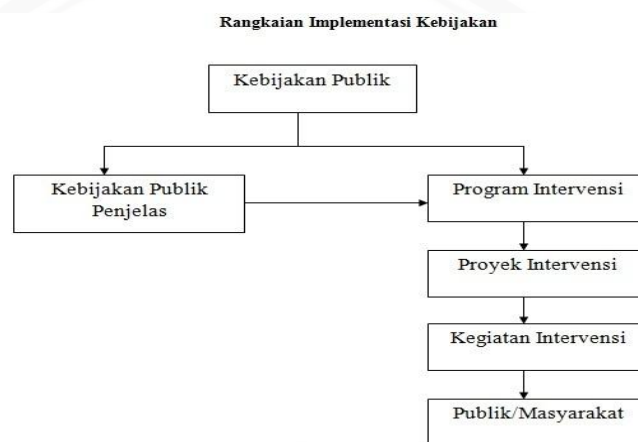
Tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam proses implementasi sebuah program terdapat serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis dimana aktivitas tersebut dituangkan dalam bentuk persiapan, pengaturan dan pelaksanaan.

3. Implementasi Program dalam Konsep Implementasi Kebijakan

Jones (dalam Widodo, 2010:86) mempunyai pemikiran sederhana tentang mengartikan implementasi yang mengatakan, *Getting the job done “and” doing it*. Selaras dengan hal tersebut Widodo (2010:87) menerangkan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Lebih jauh lagi Nugroho mengemukakan bahwa ada dua pilihan langkah yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu “langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2008:494). Berikut adalah gambaran dua pilihan langkah yang dimaksud oleh Nugroho:



Gambar 1: Sekuensi Implementasi Kebijakan

Sumber: Nugroho (2008:495)

Mengacu pada hal tersebut Nugroho menguraikan gambar tersebut bahwa:

“kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas mulai dari program, ke proyek, ke kegiatan.” (Nugroho, 2008:495)

Dengan demikian, apabila mengacu pada pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah rangkaian dari implementasi kebijakan publik yang berfungsi sebagai alat untuk tujuan kebijakan dapat tercapai.

Sehingga dengan kata lain, program merupakan bentuk dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang menyebabkan program dan kebijakan publik adalah suatu kesatuan. Hal ini di dukung oleh pendapat Widodo (2010:87) yang mengatakan hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang harus seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

D. Pendidikan Pemilih

1. Pengertian Pendidikan Pemilih

Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai tertentu kepada suatu generasi untuk membentuk sikap dan perilaku. Nilai-nilai itu diharapkan menjadi pedoman dan sumber inspirasi dalam melihat dan menghadapi suatu hal. Sedangkan pemilih adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika pemilu atau pemilihan dilaksanakan. Pendidikan pemilih dalam konteks penyelenggaraan pemilu adalah pendidikan untuk menanamkan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut KPU RI (2015:2) pendidikan pemilih adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu atau potensial pemilih dalam rentang waktu kemudian.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pendidikan pemilih adalah suatu upaya untuk menanamkan dan memberikan pemahaman tentang pemilu dan demokrasi kepada para pemilih.

2. Tujuan Pendidikan Pemilih

a. Peningkatan Partisipasi

Pendidikan pemilih dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan atau di luar pemilihan. Pada periode pemilihan, pendidikan dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat dalam setiap tahapan pemilihan, sedangkan pada periode di luar pemilihan, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan.

b. Peningkatan Literasi Politik

Literasi politik merupakan seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih meliputi pemahaman yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Literasi politik yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi dalam sebuah proses politik. Tingkat literasi politik yang rendah menjadikan proses politik akan didominasi oleh segelintir orang.

c. Peningkatan Kerelawanan

Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk meningkatkan sikap kerelawanan pemilih. Kerelawanan sendiri adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa

pamrih. Kerelawanan adalah bentuk kesadaran individu untuk berpartisipasi. Lawan dari kerelawanan adalah pragmatisme. Pragmatisme dalam konteks pemilih adalah pemilih yang menjual belikan posisi mereka dengan orientasi material. Pendidikan pemilih harus mendorong berkembangnya kerelawanan dan mengikis pragmatisme.

3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Pemilih

a. Segmentasi

Segmentasi adalah pembilahan sosial yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang terpilah ke dalam kelompok-kelompok pemilih homogen yang potensial. Setiap segmen pemilih memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda. Oleh karena itu pendekatan pendidikan pemilih yang dipakai berbeda-beda setiap kelompoknya.

b. Orientasi Kepada Pemilih

Pendidikan pemilih harus berorientasi kepada pemilih maksudnya adalah kepentingan pemilih sebagai warga negara menjadi penguat. Pendidikan pemilih meletakkan pemilih sebagai subjek yang membangun nalarnya sendiri. Pendidikan pemilih memandu bagaimana kesadaran dan tindakan kritis-reflektif dihasilkan. Hal ini penting agar pemilih tidak dapat dibelokkan untuk pemahaman atau pola pikir yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pemilih sebagai warga negara.

c. Kontekstual

Pendidikan pemilih harus bersifat kontekstual, dalam arti sesuai dengan situasi dan kondisi mutakhir (kekinian) dan kondisi setempat

(kedisinian). Kontekstualisasi pada sisi materi menjadikan pendidikan pemilih sesuai dengan kondisi terkini dan juga dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi.

d. Partisipatif

Partisipatif maksudnya adalah melibatkan segenap pemangku kepentingan. Keterlibatan itu meliputi keseluruhan proses pendidikan pemilih, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. KPU tidak mungkin melakukan pendidikan pemilih sendiri. Dalam negara demokrasi, pendidikan pemilih adalah kepentingan bagi seluruh pihak.

e. Berkesinambungan

Berkesinambungan dimaksudkan pendidikan pemilih pelaksanaannya periode pemilihan dan periode diluar pemilihan. Pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa pemilihan. Selain itu berkesinambungan mempunyai arti berkelanjutan, dan materi yang disampaikan harus saling terkait atau berhubungan.

4. Kelompok Sasaran

Terdapat dua kluster pemilih yang menjadi kelompok sasaran dalam pendidikan pemilih, yaitu :

a. Kelompok Pemilih Strategis

Kelompok pemilih strategis adalah kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Kluster ini terbagi dalam pra-pemilih, pemula, perempuan, marginal dan penyandang disabilitas, dan agamawan.

1) Pra pemilih

Pra pemilih adalah kelompok usia yang saat ini belum memasuki usia pemilih namun dalam 5 tahun kedepan akan memasuki usia pemilih. Rata-rata mereka saat ini sedang duduk di bangku kelas SMP dan SMA.

2) Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/pemilukada. Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih pemula dalam setiap pemilu cukup besar. Kedua, mereka adalah warga negara yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam pemilu sehingga perlu diberi arahan yang baik agar memiliki pemahaman demokrasi yang baik pula. Ketiga, mereka adalah calon pemimpin masa depan sehingga dengan menggali dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi, dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan.

3) Perempuan

Pemilih perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia memilih dan telah menikah. Pemilih perempuan menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih perempuan seimbang dengan pemilih laki-laki namun kapasitasnya masih terbatas

dibandingkan laki-laki. Kedua, pemilih perempuan rentan dimobilisasi baik ketika pemilu maupun diluar pemilu. Ketiga, tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Keempat, pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran domestik rumah tangga sehingga kurang kepentingan publik yang menyangkut perempuan jadi terabaikan.

4) Kelompok Marginal dan Penyandang Disabilitas

Kelompok marginal dan penyandang disabilitas adalah suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna dalam masyarakat. Kelompok marginal tercipta sebagai imbas dari perubahan struktural di masyarakat yang menghasilkan residu seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan. Sementara itu penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Kelompok ini menjadi kelompok sasaran karena mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya. Kelompok ini juga rentan dimobilisasi dan dikomodifikasi dalam berbagai peristiwa politik.

5) Agamawan

Kelompok ini adalah para pemuka agama atau aktivis keagamaan tertentu. Segmen ini sangat strategis untuk menjadi sasaran pendidikan politik dan pemilih karena kultur Indonesia yang menempatkan mereka pada posisi yang mulia. Sebagian masyarakat memiliki ikatan ideologis dan religius dengan pemuka agama.

b. Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah sejumlah daerah atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (*random*). Kluster ini terbagi ke dalam daerah dan kelompok masyarakat dengan partisipasi pemilih rendah, potensi pelanggaran pemilu tinggi serta daerah rawan konflik dan kekerasan.

1) Partisipasi Pemilih Rendah

Partisipasi pemilih rendah adalah partisipasi pemilih pada pemungutan suara di suatu daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan) secara konsisten dibawah ambang batas minimal untuk kategori demokrasi yang mapan.

2) Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi

Potensi pelanggaran pemilu tinggi adalah daerah yang dalam sejarah pelaksanaan pemilu terjadi berbagai pelanggaran pemilu yang berulang, atau terjadi pelanggaran yang sifatnya masih, atau terstruktur, atau sistematis. Pada intinya, daerah itu dalam penyelenggaraan pemilu terjadi berbagai peristiwa yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Ada tiga kategori pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran etika penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan tindak pidana pemilu.

3) Daerah Rawan Konflik dan Kekerasan

Daerah rawan konflik dan kekerasan adalah daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya perseteruan atau benturan fisik antara dua

kelompok masyarakat atau lebih yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu. Daerah rawan konflik dan kekerasan menjadi sasaran pendidikan pemilih karena beberapa alasan. Pertama, konflik dapat menghambat akses masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Kedua, konflik dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat sehingga mengganggu kemandiriannya dalam menggunakan hak pilih. Ketiga, konflik dapat mengganggu, bahkan menggagalkan penyelenggaraan pemilu sehingga sirkulasi kekuasaan secara berkala di daerah tersebut terhambat.

c. Kelompok Sasaran Lain

Kelompok sasaran lain adalah kelompok diluar pemilih strategis dan kelompok rentan, yang dianggap dapat mewakili kondisi dan karakteristik di daerah setempat. Sekolah-sekolah demokrasi, komunitas pegiat pemilu, atau komunitas etnis tertentu merupakan kelompok sasaran lain yang dapat dijadikan kegiatan pendidikan pemilih.

E. Rumah Pintar Pemilu (RPP)

1. Konsep Rumah Pintar Pemilu

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan tata ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program dan aktivitas proyek edukasi kepada masyarakat. Rumah pintar pemilu sebagai program pelayanan untuk pendidikan pemilih dan juga menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu

untuk membangun sebuah gerakan. Alokasi anggaran untuk pembentukan rumah pintar pemilu berasal dari APBN.

Rumah Pintar Pemilu dilengkapi oleh sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Untuk menunjang penyampaian materi kepada pemilih rumah pintar pemilu mempunyai ruang pameran, ruang simulasi, ruang *audio visual* dan ruang diskusi. Rumah pintar pemilu hadir untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Sasaran dari rumah pintar pemilu adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat dalam masyarakat. Sesuai dengan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu tujuan dari dibentuknya Rumah Pintar Pemilu dibagi dua, yaitu:

a. Tujuan Umum

Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu menjadi pusat informasi kepemiluan.

b. Tujuan Khusus

Mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara:

- 1) Memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (pra pemilih)
- 2) Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen)
- 3) Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen)

2. Materi Rumah Pintar Pemilu

Rumah pintar pemilu, setidaknya harus tersedia materi-materi kepiluan dan demokrasi sebagai bahan pendidikan pemilih, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk antara lain: maket atau diorama, panel dinding informasi (manual atau *digital*), *booklet*, *leaflet*, *flyer*, video, film, dsb. Materi dalam bentuk panel dinding informasi dibuat dengan desain yang menarik, ringkas dan memuat pokok-pokok atau garis besar substansi materi yang akan ditampilkan. Materi yang lebih mendetail dan lengkap dituangkan dalam bentuk lainnya, seperti *booklet*, *leaflet*, *flyer*, dsb.

Beberapa lingkup materi yang terdapat di Rumah Pintar Pemilu untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang pemilu kepada masyarakat antara lain, Sejarah Pemilu. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi, Sistem Pemilu, Tahapan Pemilu, Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres), Proses Pemilihan, Profil Penyelenggara Pemilu, Uji Pengetahuan Pemilu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari suatu laporan dan menjadi bagian yang vital dari suatu laporan.

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu laporan penelitian. Selain itu juga unsur vital untuk menunjang hasil dari suatu laporan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang di dalamnya bisa berupa kata-kata maupun tulisan dari orang yang sedang diamati. (Sugiyono, 2014:6) mengatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. Penelitian ini bermaksud untuk mendiskripsikan fenomena dan fakta yang senyatanya terjadi di lapangan mengenai implementasi program KPU Kota Batu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif, yang juga terdapat dari fungsi penelitian kualitatif. Penelitian

ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Dengan penggunaan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memaparkan mengenai implementasi Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih. Selain itu, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dapat dilakukan secara langsung di lapangan.

Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci yang melukiskan keadaan yang ada, mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang diperlihatkan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, dan melakukan evaluasi yang dapat menghasilkan suatu masukan untuk KPU Kota Batu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang secara keseluruhan akan diteliti secara detail oleh peneliti, supaya peneliti memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang keadaan yang diteliti dan mempunyai batasan sehingga tidak membuat pengertian suatu penelitian menjadi semakin luas. Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2014:208) menyebutkan fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penetapan fokus penelitian

bertujuan untuk memberi batasan terhadap sebuah permasalahan yang ada agar terarah, tidak meluas, serta relevan dengan objek penelitian, sehingga memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya fokus dalam sebuah penelitian akan memungkinkan peneliti untuk mengetahui data mana yang perlu diambil dan data mana yang tidak perlu diambil setelah data-data dikumpulkan. Oleh karena itu, fokus penelitian akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dan mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan karena pusat perhatian dari permasalahan-permasalahan yang dikaji dan dianalisis menjadi semakin jelas.

Dengan demikian peneliti menjadikan fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu. Fokus selaras dengan tahap implementasi menurut Jones (dalam Widodo, 2010:89). Dalam hal ini terkait dengan:
 - a. Tahap Interpretasi
 - 1) Pemahaman dan Konsistensi Tujuan
 - 2) Sosialisasi Program
 - b. Tahap Pengorganisasian
 - 1) Pelaksana Program
 - 2) *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 3) Sumber Daya
 - a) Keuangan

- b) Sarana dan Prasarana
 - c) Sumber Daya Manusia
 - 4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Program
 - 5) Jadwal Kegiatan
 - c. Tahap Aplikasi
 - 1) Persiapan Pelaksanaan Program
 - 2) Pelaksanaan Program
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu, dalam hal ini kaitannya dengan:
- a. Faktor apa saja yang mendukung dalam implementasi program KPU Kota Batu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu.
 - 1) Faktor Teknologi
 - 2) Faktor Materi Rumah Pintar Pemilu
 - b. Faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi program KPU Kota Batu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu.
 - 1) Faktor Anggaran
 - 2) Faktor Prasarana
 - 3) Faktor Kurang Antusias Masyarakat
 - 4) Faktor Sumber Daya Manusia
 - 5) Faktor SOP

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Sedangkan situs penelitian dalam tempat seharusnya peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian ini adalah Rumah Pintar Pemilu di Kota Batu. Letak lokasi penelitian dan situs penelitian berada disatu tempat yang sama yaitu di Jl. Raya Tlekung No. 212 Kecamatan Junrejo Kota Batu.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Arikunto (2002:129) dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data yang berupa jawaban lisan. Sumber data ini didapat dengan cara tanya jawab perorangan atau wawancara.
2. *Place* atau peristiwa, yaitu sumber data yang dapat menyajikan keadaan yang terjadi baik dalam bentuk diam atau gerak.
3. *Paper* atau dokumen, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa gambar, angka atau huruf. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data dan arsip yang berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu.

Sedangkan sumber data akan dikelompokkan menjadi dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya atau data yang didapat oleh peneliti sendiri sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi

sumber data primer adalah Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu, Bapak Ariansyah selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas, Bapak Sumantri dan Ibu Nuning Sri Wahyuni selaku staff KPU Kota Batu, dan masyarakat sebagai sasaran antara lain Dwi Prasetyo selaku siswa SMAN 2 Kota Batu dan Ibu Fatimah selaku masyarakat yang tinggal di dekat KPU Kota Batu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berbentuk tulisan atau informasi dapat berupa dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu yang berkaitan dengan dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih milik KPU Kota Batu. Yang termasuk data sekunder antara lain adalah dokumen, arsip, dan laporan resmi.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a. Rencana Strategi KPU Kota Batu
- b. Buku Pendidikan Pemilih
- c. Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu
- d. Data sarana dan prasarana
- e. Laporan Kinerja KPU Kota Batu 2017
- f. Data kegiatan yang berkaitan dengan Rumah Pintar Pemilu
- g. *Website*

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena unsur utama dalam penelitian adalah memperoleh data. Adapun dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi

partisipan, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya atau triangulasi (Sugiyono, 2014:293). Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2014:226) menyebutkan bahwa, observasi dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar peneliti dapat meneliti obyek atau situasi sosial yang diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi non partisipan. Sehingga dalam observasi non partisipan, peneliti tidak langsung terlibat pada objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan dalam penelitian sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tapi tidak menutup kemungkinan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Hal ini pula didukung oleh pendapat Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2014:232) yang menyimpulkan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-

hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Sehingga dalam melakukan penelitian kali ini, peneliti menggabungkan teknik observasi non partisipan dengan menggunakan wawancara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen juga dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014:240). Teknik dokumentasi ini dilakukan agar dapat memperoleh data-data sekunder yang dapat menjadi tambahan ulasan atau pembahasan dari hasil yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen yang ada di lokasi penelitian agar dapat dipelajari dan dimasukkan ke dalam hasil penelitian jika memiliki keterkaitan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat apa saja yang digunakan untuk dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014:222) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri dalam mengamati keadaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga didapatkan jawaban-jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan mendapatkan data-data yang berguna sebagai bahan penelitian.

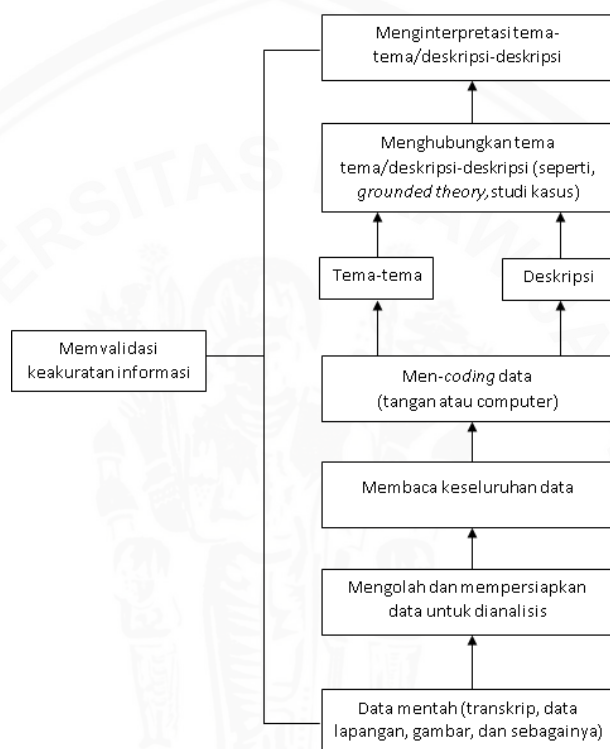
2. Pedoman wawancara untuk mempermudah wawancara maka dipergunakan pedoman agar hasil yang diharapkan dapat maksimal.
3. Catatan laporan lapangan, buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi utamanya yang bersifat verbal yang diperoleh selama penelitian.
4. Perangkat penunjang (*tape recorder, handphone, internet, dan kamera*).

G. Metode Analisis

Cresswell (2016:274) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan beberapa pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang melakukan penelitian. Analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menggambarannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, kita mendapatkan data dengan berbagai macam teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data didapatkan secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti dapat menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan analisis data Cresswell, sebab menurut peneliti analisis data Cresswell dianggap dapat menterjemahkan semua data yang didapatkan menjadi sebuah informasi dengan mudah dan juga peneliti menganggap analisis data ini sebagai teori baru. Meskipun model analisis data sangat banyak dan berbeda-beda, penelitian

kualitatif pada umumnya menggunakan prosedur yang terbilang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Menurut Creswell (2016:27) menyatakan bahwa cara yang paling ideal adalah dengan mencampurkan prosedur umum tersebut dengan langkah-langkah khusus. Seperti yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 2. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif (John W. Creswell)

Sumber: Creswell John.W. 2016. Penelitian Kualitatif & Desain Riset.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pendekatan gambar di atas dapat dijelaskan menjadi lebih mendalam dan detail dalam langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data yang akan dianalisis. Langkah ini membutuhkan hasil wawancara, menyalin literatur, mengetik data lapangan, atau memilih dan menyusun data yang ada serta relevan berkaitan dengan

implementasi program Rumah Pintar Pemilu ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data. Dalam menggunakan analisis data tersebut langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan, yang terkandung dalam perkataan informan, bagaimana inti gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas, dan penuturan informasi itu. Di dalam tahap ini, peneliti menulis beberapa catatan khusus tentang data yang digali dan diperoleh mengenai implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan untuk pemilih.
3. Menganalisis menggunakan *coding*. *Coding* merupakan proses mengolah informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memakainya. Langkah ini membutuhkan beberapa tahap sehingga dalam hal ini, peneliti memilah-milah data mana yang akan dijadikan faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi tersebut seperti pada fokus penelitian.
4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang, kategori, dan tema untuk kemudian dianalisa. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang implementasi program Rumah Pintar Pemilu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini tersajikan kembali dalam laporan penelitian sebagaimana penulis lakukan dalam analisis data.
6. Langkah terakhir adalah interpretasi data atau memaknai data.

BAB IV

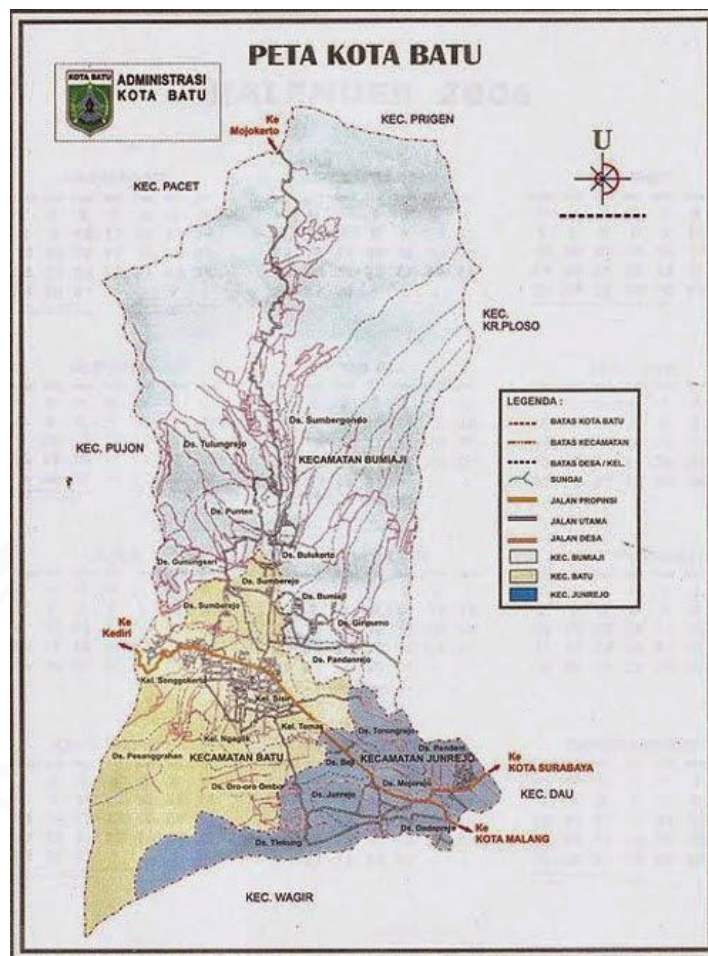
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batu

1. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Kota Batu memiliki luas secara keseluruhan sebesar 199,09 Km². Kota Batu dikelilingi oleh beberapa gunung yang membuat potensi wisata dan pertanian menjadi hal yang diutamakan oleh pemerintah Kota Batu saat ini untuk meningkatkan perekonomian. Kota Batu memiliki penduduk berjumlah 202.319 jiwa. Mayoritas penduduk Kota Batu memeluk agama Islam. Pemerintahan Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota. Secara administratif Kota Batu terdiri dari 19 desa, 5 keluarahan, dan 3 kecamatan. Kota Batu sendiri memilki batas-batas wilayah yaitu:

- (a) Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan
- (b) Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- (c) Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar dan Malang
- (d) Sebelah Barat : Kabupaten Malang



Gambar 3. Peta Kota Batu

Sumber: <http://infotulungrejobatu.blogspot.co.id/2014/09/dprd-kota-batu-dorong-pemekaran-wilayah.html>

a. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Batu terletak diantara $122^{\circ}17'$ sampai dengan $122^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}44'$ sampai dengan $8^{\circ}26'$ Lintang Selatan. Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 862 m di atas permukaan laut. Menurut luas daerah di Kota Batu, daerah yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Bumiaji, yaitu sebesar 127,98 Km².

Dilihat dari ketinggian wilayahnya, sebagian besar daerah di Kota Batu terletak di daerah perbukitan/lereng. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan

dan musim kemarau. Rata-rata curah hujan yang tercatat pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karangploso mencapai rata 189 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 129.

Secara topografi Kota Batu yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin, dengan begitu Kota Batu memiliki potensi pariwisata dan pertanian. Terdapat beberapa gunung yang terkenal secara nasional yang dimiliki Kota Batu antara lain, Gunung Arjuno (3339 mdpl), Gunung Panderman (2010 mdpl), Gunung Welirang (3156 mdpl) dan masih banyak lagi. Rata-rata suhu udara adalah 23 derajat celcius dengan suhu terendah sebesar 21 derajat celcius.

b. Administrattif

Kota Batu adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2001. Kota ini sebelumnya adalah bagian dari Kota Malang yang termasuk kedalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara. Secara administratif Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Batu. Adapun pembagian luas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Luas Pembagian Wilayah Kota Batu

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Bumiaji	127,98
Junrejo	25,65
Batu	45,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu terbagi dalam 24 kelurahan/desa sebagaimana dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4. Kelurahan/Desa yang ada di Kota Batu

No	Kecamatan Batu	Kecamatan Junrejo	Kecamatan Bumiaji
1	Ds. Oro-oro Ombo	Ds. Tlekung	Ds. Pandenrejo
2	Kel. Temas	Ds. Junrejo	Ds. Bumiaji
3	Kel. Sisir	Ds. Mojorejo	Ds. Bulukerto
4	Kel. Ngaglik	Ds. Torongrejo	Ds. Gunungsari
5	Ds. Pesanggrahan	Ds. Beji	Ds. Punten
6	Kel. Songgokerto	Ds. Pendem	Ds. Tulungrejo
7	Ds. Sumberejo	Ds. Dadaprejo	Ds. Sumbergondo
8	Ds. Sidomulyo		Ds. Giripurno
9			Ds. Sumberbrantas

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kelurahan/desa paling banyak terdapat di Kecamatan Bumiaji dengan 9 (sembilan) desa, sedangkan kecamatan yang memiliki kelurahan/desa paling sedikit adalah Kecamatan Junrejo yang terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan/desa. Sementara itu Kecamatan Batu terdapat 8 (delapan) kelurahan/desa.

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kota Batu pada tahun 2016 sebesar 202.319 jiwa, yang terdiri dari 101. 719 jiwa laki-laki dan 100.600 jiwa perempuan. Dengan wilayah sebesar 199,09 km², maka kepadatan penduduk Kota Batu sebesar 4.921 jiwa per km². Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk yang terus meningkat selaras dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun Kota Batu pada tahun 2016 sebesar 0,91 persen. Dari 202.319 jiwa penyebaran penduduk di Kota Batu bila dilihat dari 3 kecamatan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Batu

Kecamatan	Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Batu	47 017	47 115	94 132	100
Junrejo	25 456	24 623	50 079	103
Bumiaji	29 246	28 862	58 108	101
Kota Batu	101 719	100 600	202 319	101

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Batu dengan jumlah 94.132 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah terdapat di Kecamatan Junrejo dengan jumlah 50.079 jiwa. Sementara itu di Kecamatan Bumiaji jumlah penduduknya adalah 58.108 jiwa. Berdasarkan tabel tersebut juga

dapat dilihat rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang ada di Kota Batu sebesar 101. *Sex ratio* adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam 100 orang perempuan. Berdasarkan tabel diatas juga dapat disimpulkan bahwa penyebaran penduduk Kota Batu belum merata. Penduduk Kota Batu mayoritas adalah beragama Islam, seperti tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
Batu	931.008	5.333	2.303	62	360	5	85
Junrejo	61.661	770	206	274	12	0	28
Bumiaji	51.788	2.196	364	77	225	0	54
Total	206.457	8.299	2.873	413	597	5	167

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel diatas mayoritas penduduk Kota Batu memeluk agama Islam. Sedangkan minoritas penduduk Kota Batu memeluk agama Konghucu. Masih terdapat juga agama selain Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu dengan jumlah sebesar 167.

d. Pemerintahan

Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Pada Pilkada 2017 tersebut terpilih Dewanti Rumpoko sebagai Walikota dan Panjul Santoso sebagai Wakil Walikota untuk masa bakti 2017-2022. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah Kota Batu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian setiap kebijakan untuk menghasilkan suatu pembangunan mandiri dan berdayaguna disetiap bidang sehingga dapat memperbaiki

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Batu dituntut untuk mampu mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya sehingga dapat menunjang keberhasilan pembangunan tersebut.

e. Visi dan Misi Kota Batu

1) Visi

Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional, ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumber daya yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Misi

- 1) Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama
- 2) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
- 3) Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik
- 4) Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional
- 5) Optimalisasi pemerintah daerah
- 6) Peningkatan kualitas pendidik dan lembaga pendidikan
- 7) Peningkatan kualitas kesehatan
- 8) Pengembangan infrastruktur (sektor fisik) khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas publik, prasarana dan sarana lalu lintas

- 9) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- 10) Menciptakan stabilisasi dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis
- 11) Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UKM.

2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) yang ada di wilayah Kota Batu. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Kota Batu memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawal perjalanan demokrasi dan politik di wilayah Kota Batu. Tugas KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu tetapi juga memberikan pendidikan terhadap para pemilih. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak maupun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

a. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Sebagai lembaga vertikal yang menganut sistem hirarki, visi dan misi KPU Kota Batu sesuai dengan visi dan misi KPU RI. Adapun visinya adalah “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

b. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Kota Batu selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

c. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kota Batu yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

d. Tugas, Kewenangan, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 88, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b) memberikan dukungan teknis administratif;

- c) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; ,
 - d) membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; :
 - e) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- a) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b) memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kota Batu secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Struktur kelembagaan KPU Kota Batu terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota. Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyatakan pembagian struktur dan tugas dari KPU adalah sebagai berikut:

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- a) Administrasi Perkantoran;
 - b) Kearsipan;
 - c) Protokol dan persidangan;
 - d) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - e) Kerumahtanggaan kantor;
 - f) Keamanan;
 - g) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - h) Logistik;
 - i) Pengadaan barang dan jasa.
2. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b) Pencalonan;
 - c) Pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - d) Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.
3. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a) Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b) Pemutakhiran data pemilih
 - c) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - d) Pengelolaan jaringan IT;
 - e) Scan Hasil Pemilu;
 - f) Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.

4. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:

- a) Administrasi dan Rekrutmen Kepegawaian;
- b) Rekrutmen dan PAW Anggota KPU dan Badan AdHock;
- c) Diklat dan Pengembangan SDM;
- d) Pengembangan budaya kerja organisasi;
- e) Penegakan disiplin organisasi;
- f) Kampanye;
- g) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
- h) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- i) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Adapun bagan organisasi KPU Kota Batu dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 4. Struktur Organisasi KPU Kota Batu

Sumber: Laporan Kinerja KPU Kota Batu 2017

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Batu dilakukan pembagian divisi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, tanggal 09 Agustus 2016, No. 25/Kpts/KPU-Kota-014.329951/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu No. 07/Kpts/KPU-Kota-014.329951/2014 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Tabel 7. Daftar Nama Komisioner KPU Kota Batu Masa Bakti 2014-2019

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	DIVISI
1	Rochani, S.Pi., MP.	Perempuan	Ketua Divisi Teknis merangkap Wakil Ketua Divisi Perencanaan dan Data,
3	Ashar Chilmi, S.Psi	Laki-laki	Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik merangkap Wakil Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
2	Erfanudin	Laki-laki	Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik merangkap Wakil Ketua Divisi Hukum
4	Mardiono, S.HI,	Laki-laki	Ketua Hukum merangkap Wakil Ketua Divisi Teknis.
5	Saifudin Zuhri, S.HI	Laki-laki	Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat merangkap Wakil Divisi Umum, Keuangan dan Logistik.

Sumber: Laporan Kinerja 2017 KPU Kota Batu

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisioner KPU Kota Batu dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Batu yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kota Batu sekaligus menjabat sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengelolaan Keuangan.

f. Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum kota Batu

Berdasarkan pasal 10 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 yang diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008. KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat. Sekretariat KPU Kota Batu dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan menurut pasal 168, Sekretariat KPU Kota Batu adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yaitu (1) Kasubbag Kuangan, Umum dan Logistik, (2) Kasubbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, (3) Kasubbag Program dan Data, serta (4) Kasubbag Hukum. Susunan pegawai KPU Kota Batu terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah. Pegawai Pusat atau yakni Pegawai Organik adalah pegawai yang diangkat melalui SK Sekretaris Jenderal KPU, sedangkan Pegawai Daerah adalah pegawai Pemerintahan Kota Batu yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu. Berikut adalah tabel nama-nama pegawai di KPU Kota Batu:

Tabel 8. Daftar Nama Pegawai KPU Kota Batu

NO .	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JEN IS KE LA MI N	PEND IDIKA NUM UM	Status Pegawai	Kete rang an
1	2	3	4	6	7	8
1	Thomas Maydo S.Sos	Sekretaris	L	S1	DPK	
2	Badrut Tamam W, SH	Kasubbag Hukum	L	S2	DPK	

3	Fitrya Faradevi, SH, M.Hum	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	P	S2	DPK	
4	Irfan Darmawan, S.I.Kom, M.IP	Kasubbag Program dan Data	L	S2	Organik	
5	Ariansyah Mustafa, S.IP	Kasubbag Teknis dan Hupmas	L	S1	Organik	
6	Prasetya Dwi Palupi, SE	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	L	S1	DPK	
7	Sudari	Verifikator keuangan	L	S1	DPK	
8	Sumaryadi	Pengolah bahan evaluasi dan dokumentasi	L	S1	DPK	
9	Adityarini Nugrahayu, SE, MM	Penyusun Laporan Keuangan	P	S2	Organik	
10	Uke Wahyu Hidayati, SE	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	P	S1	Organik	
11	Neneng Susanty, SE	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	P	S1	DPK	
12	Mahyuni, SH	Analisis Hukum	L	S1	Organik	
13	Dimas Brahmadi Yuli Satria, S.ST	Verifikator Keuangan	L	D IV	Organik	
14	Nuning Sri Wahyuni, A.Md	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	P	D III	Organik	
15	Septiana Wulandari, A.Md	Penyusun Program dan Anggaran	P	D III	Organik	
16	Joko Sulistyio	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas	L	SMU	DPK	
17	Eko Iswahyudi	Pembuat Daftar Gaji	L	SMU	Organik	
18	Samsul Arifin	Non JFU	L	SMU	DPK	

Sumber: Laporan Kinerja 2017 KPU Kota Batu

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pegawai di KPU Kota batu sebanyak 18 (delapan belas) orang. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dijelaskan bahwa kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan dengan pendidikan S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 8 orang, DI V sebanyak 1 orang, D III sebanyak 2 orang, dan SMA sebanyak 3 orang. Untuk menjalankan tugasnya KPU Kota Batu juga dibantu oleh tenaga honorer. Berikut adalah tabel nama-nama tenaga honorer di KPU Kota Batu:

Tabel 9. Daftar Nama Tenaga Honorer KPU Kota Batu

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN UMUM	Status Pegawai T.M.T	Keterangan
1	2	3	4	6	7	8
1	LIOK SUGIARTO	Malang, 5 Oktober 1970	L	SMA	1991	Satpam
2	CATUR SLAMET RISDIANTO	Malang, 29 Maret 1978	L	S-1	2002	Satpam
3	SUGENG MULIONO	Malang, 9 Januari 1988	L	SMK	2006	Satpam
4	ROIHAH	Pasuruan, 23 Mei 1967	P	SMA	2009	Pramusaji
5	DODIK HARIYANTO	Malang, 21 April 1982	L	SMK	2000	Pramubakti
6	SUMANTRI	Malang, 30 Januari 1986	L	D3	2017	Sopir
7	SUPAI	Malang, 20 Juni 1984	L	SMK	2000	Petugas Taman

Sumber: Laporan Kinerja 2017 KPU Kota Batu

Berdasarkan tabel diatas terdapat 7 tenaga honorer yang ada di KPU Kota Batu untuk mendukung KPU Kota Batu menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya Pendidikan untuk Pemilih milik KPU Kota Batu

Permasalahan yang kerap dihadapi sebagai negara demokrasi mengenai pemilihan umum seringkali adalah adanya golput, pengetahuan tentang pemilu rendah, kesadaran politik juga rendah. Untuk itu pada tahun 2017 KPU RI membuat surat edaran nomor 54/KPU/I/2017 tentang pembentukan Rumah Pintar Pemilu. Status program ini ditingkatkan menjadi prioritas nasional karena pada tahun 2018 akan diadakan Pilkada serentak. Melalui surat edaran KPU RI nomor 86/HM.03.5-SD/06/KPU/I/2018, berdasarkan surat edaran tersebut seluruh KPU kabupaten/kota seluruh

Indonesia dituntut untuk membuat program Rumah Pintar Pemilu. Tujuan yang ingin dicapai oleh KPU melalui Rumah Pintar Pemilu adalah mengurangi angka golput, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan menanamkan nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga dengan KPU Kota Batu walaupun mempunyai tingkat partisipasi politik tinggi pada Pilkada 2017 sebesar 80,90%. Untuk mengetahui implementasi program tersebut, berikut dijabarkan penjelasan tentang proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu yang mengacu kepada tiga tahapan yaitu interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi.

a. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi adalah tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Pada tahap ini interpretasi menjadi kegiatan untuk mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui, memahami, menerima dan mendukung pelaksanaan dari suatu kebijakan. Maksudnya adalah mensosialisasikan program Rumah Pintar Pemilu kepada para pihak yang terlibat (*stakeholder*) agar memiliki pemahaman yang sama guna mencapai tujuan dari terbentuknya program Rumah Pintar Pemilu. Oleh sebab itu, pada tahapan ini hal yang ditinjau adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman dan Konsistensi Tujuan

Pemahaman dalam konteks program Rumah Pintar Pemilu adalah bagaimana KPU Kota Batu sebagai penyelenggara mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran dari program ini. Adapun harapannya setelah memahami mengenai program Rumah Pintar Pemilu agar pelaksanaannya dilakukan sebagaimana mestinya guna mencapai tujuan dari program Rumah Pintar Pemilu. Apabila penyelenggara sudah memahami mengenai program tersebut maka harus tercapai sebuah tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini KPU Kota Batu memahami perannya sebagai penyelenggara KPU sesuai dengan pernyataan Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, bahwa:

“Jadi Rumah Pintar Pemilu ini sebenarnya *kan* konsep dari KPU RI, semua KPU di seluruh Indonesia harapannya membuat Rumah Pintar Pemilu. *Nah* harapannya memanfaatkan ruang-ruang yang ada di KPU kabupaten atau Kota untuk dijadikan tempat pendidikan termasuk juga untuk simulasi dan lain sebagainya itu. Itu sebenarnya latar belakang yang diharapkan oleh KPU RI. Kalau kita Rumah Pintar Pemilu bukan hanya pemilih pemula tapi seluruh masyarakat Kota Batu yang ingin mengetahui tentang kepemiluan dan demokrasi. Jadi dengan adanya Rumah Pintar Pemilu ini harapannya adalah meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas maupun kualitas dalam seluruh proses tahapan tentang pemilu, menjadi pusat informasi kepemiluan *lah*. Kemudian secara khusus bisa melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Jadi itu dengan adanya Rumah Pintar Pemilu ini, itu paling tidak bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terkait tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Termasuk nilai-nilai pemilu dan demokrasi dan sebagainya. (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Hal ini sesuai dengan informasi lain yang didapat dari Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas, yang mengatakan bahwa:

“Rumah Pintar Pemilu ini merupakan inovasi yang dibuat oleh KPU RI, lalu seluruh KPU yang ada di Indonesia dituntut untuk membuat Rumah Pintar Pemilu. Awalnya karena tingkat partisipasi dan golput yang ada di Indonesia maka dari itu dibuat Rumah Pintar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu ini sesuai dengan surat edaran no. 54/KPU/I/2017 tentang pembentukan Rumah Pintar Pemilu yang diwujudkan melalui pemanfaatan ruang yang ada di KPU Kabupaten atau Kota. Tujuannya sudah jelas kalau pendidikan berarti menambah ilmu pengetahuan. Disini berarti menambah ilmu pengetahuan pemilih tentang kepemiluan dan demokrasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu juga untuk menjadi pusat informasi kepemiluan. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Kedua hasil wawancara tersebut selaras dengan pendahuluan, tujuan, dan sasaran yang ada di Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu. Dimana isi dari pendahuluan, tujuan dan sasasarannya adalah “Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu. Tujuan Umum dari Rumah Pintar Pemilu adalah meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu dan menjadi pusat informasi kepemiluan. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi dengan cara

memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi, menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi. Sasaran Rumah Pintar Pemilu adalah masyarakat umum dan seluruh segmentasi yang terdapat dalam masyarakat.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pemahaman dan konsistensi tujuan KPU Kota Batu mengenai Rumah Pintar Pemilu sudah sesuai dengan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu.

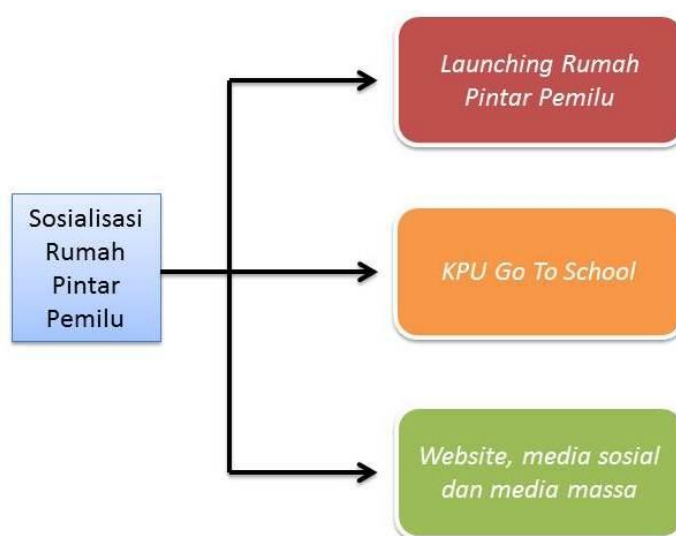
2) Sosialisasi Program

Sebuah program harus disosialisasikan guna mendapat dukungan dan diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat khususnya masyarakat. Hal ini juga sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas upaya yang dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan. Adanya kegiatan sosialisasi juga dapat dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan baik dalam bentuk aspirasi, material maupun jasa terhadap pengembangan suatu daerah. Sehingga muncul harapan supaya masyarakat dapat turut serta atau mendorong untuk menyelesaikan implementasi sebuah program.

Program Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu melakukan sosialisasi dengan maksud seperti pemaparan diatas. Selain sebagai upaya bentuk akuntabilitas dan transparansi KPU Kota Batu, juga sebagai bentuk agar program tersebut dapat diketahui dan didukung oleh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan juga untuk

menyamakan pemahaman bagi para pihak yang terlibat untuk bisa bekerjasama untuk mencapai tujuan dari program Rumah Pintar Pemilu.

Adapun wujud kongkritnya ialah seperti gambar berikut:



Gambar. 5 Sosialisasi Program Rumah Pintar Pemilu

Sumber: Dokumen Peneliti

Gambar tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Saifudin

Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, bahwa:

“Begini mas setelah selesai proses pembentukannya Rumah Pintar Pemilu segera diresmikan oleh Bapak Walikota Edy Rumpoko pada tanggal 13 September kemarin (2017). Saat peresmian ini kita mengundang para siswa SMA dari beberapa sekolah untuk hadir dan menyaksikan peresmian Rumah Pintar Pemilu. Setelah diresmikan Pak Edy bersama para siswa melihat langsung “Wisata Demokrasi” ini. Setelah itu kami KPU Kota Batu melakukan sosialisasi Rumah Pintar Pemilu ini ke sekolah-sekolah. Jadi kita datang ke sekolah untuk mensosialisasikan Pilgub serentak ini, nama agenda sosialisasinya ini adalah “KPU Go To School”. KPU Go To School ini sudah menjadi agenda rutin KPU setiap ada momen-momen pemilu apalagi di setiap sekolah pasti akan ada generasi yang baru (pemilih pemula). Disini kami sebagai pembina upacara dalam mensosialisasikan pemilu. Nah setelah itu kita menawarkan atau bisa juga disebut sosialisasi mengenai Rumah Pintar Pemilu ini. Jadi kalau mereka ingin mendalami lagi tentang teknis pemilu, ilmu kepemiluan, dan demokrasi silahkan datang ke Rumah Pintar Pemilu ini. Tapi

memang saya akui tidak semua orang yang telah disosialisasi mempunyai antusias yang baik kepada program ini, ada yang biasa-biasa saja. Dan ada juga yang antusias. *Oh iya*, berhubungan dengan ada yang tidak antusias pada Rumah Pintar Pemilu ini, kita juga akan membuat brosur tentang Rumah Pintar Pemilu ini guna menarik peminat bagi masyarakat terutama pemilih muda. Nantinya brosur ini akan kami sebar ke seluruh sekolah yang ada di Kota Batu. Mudah-mudahan bisa berdampak baik nanti setelah adanya brosur.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Kemudian informasi lainnya juga diungkapkan oleh Bapak Ariansyah Mustafa, S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas, bahwa:

“Cara kami untuk mesosialisasikan Rumah Pintar Pemilu ditempuh dengan cara mengundang pelajar atau mahasiswa untuk melakukan pendidikan pemilih di ruang Rumah Pintar Pemilu lalu menyampaikan dengan lisan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan divisi SDM dan Parmas dan juga melalui sosial media seperti web KPU kota Batu, beberapa kantor berita yang kita undang saat peresmian.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Pernyataan dari kedua wawancara tersebut juga didukung oleh gambar sebagai berikut:



Gambar 6. Launching Rumah Pintar Pemilu
Sumber: Data KPU Kota Batu



Gambar 7. KPU Go To School

Sumber: Data KPU Kota Batu

Berdasarkan hasil dua wawancara dan beberapa gambar diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi dari proram Rumah Pintar Pemilu untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017 dalam bentuk peresmian Rumah Pintar Pemilu. Rumah Pintar Pemilu disahkan langsung oleh Walikota Batu dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemberian edukasi kepada anak-anak sekolah yang diundang saat itu. Setelah itu KPU Kota Batu mensosialisasikan program Rumah Pintar Pemilu pada saat menjalankan agenda *KPU Go To School*. Selain itu juga memanfaatkan media sosial milik KPU Kota Batu dan melalui media massa.

Namun belum semua masyarakat yang pernah disosialisasi merasa antusias dan mengetahui akan hadirnya Rumah Pintar Pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Fatimah sebagai warga yang tinggal di dekat KPU Kota Batu bahwa:

“Hmmm rumah pintar pemilu ya mas. Saya malah belum tau kalau ada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Batu mas. Baru tau lewat mas ini”
(Hasil wawancara pada tanggal 26 Maret 2018, pada pukul 11.00 WIB)

Selaras dengan wawancara diatas Dwi Prasetyo sebagai siswa SMAN 2 Kota Batu yang datang untuk mendapatkan edukasi dari Rumah Pintar Pemilu mengatakan bahwa:

“Kita senang diundang tapi sebenarnya *sih* biasa aja *mas* kalau kita diminta untuk datang lagi. Karena gimana ya *mas*, saya *ngerasanya* kurang menarik *mas*” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 12.15 WIB)

Dapat disimpulkan dari dua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai sasaran masih ada yang belum mengetahui program Rumah Pintar Pemilu. Selain itu juga masyarakat juga merasa biasa saja terhadap prgram Rumah Pintar Pemilu karena kurang menarik. Maka dari itu KPU Kota Batu sedang merencanakan untuk membuat brosur mengenai Rumah Pintar Pemilu, dengan harapan agar lebih dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke Rumah Pintar Pemilu.

Berdasarkan hasil dari keseluruhan wawancara mengenai sosialisasi program Rumah Pintar Pemilu dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Batu belum dapat membuat masyarakat mengetahui akan hadirnya program Rumah Pintar Pemilu dan masih terdapat masyarakat yang kurang merespon dengan baik program Rumah Pintar Pemilu.

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, anggaran yang diperlukan, penetapan sarana dan prasarana yang diperlukan, penetapan tata

kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan dari suatu program.

Oleh sebab itu beberapa hal yang ditinjau adalah sebagai berikut:

1) Pelaksana Program

Pembagian tugas tentunya sangat penting dilakukan dalam mengimplementasikan sebuah program apabila pihak yang terlibat lebih dari satu. Mengacu pada hal tersebut beberapa aktor yang terlibat dalam Rumah Pintar Pemilu, seperti yang disebutkan oleh Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas:

“Aktor yang terlibat dalam Rumah Pintar Pemilu sebenarnya sangat luas ya *mas*. Pertama itu yang pasti pemerintah setempat, sebagai salah satu *stakeholder* pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana amat dari UUD 1945. Yang kedua, itu partai politik mengapa partai politik? Karena parpol juga mengambil peran yang sangat nyata dalam mengedukasi masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan. Ketiga, itu kami sendiri KPU Kota Batu sebagai penyelenggara pemilu sudah menjadi kewajiban bagi kami sebagai penyelenggara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Keempat, tokoh masyarakat dengan status sosial yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat tokoh masyarakat mempunyai peran yang sama untuk menyampaikan hal-hal yang baik untuk kemajuan negeri ini. Kelima, kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat juga memiliki peran yang sama selama membawa kebaikan dan kemajuan buat negeri tercinta ini. Keenam, pendidik seperti guru dosen maupun mahasiswa kaya *masnya* ini juga punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang dipahami untuk kebaikan masyarakat. Tapi sampai saat ini kita belum berkomunikasi sama sekali dengan beberapa aktor yang bertanggung jawab untuk pendidikan pemilih tadi. Saya dan Pak Saifudin masih memikirkan konsep itu. *Makanya* sampai sekarang belum ada yang berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu ditambah kita harus mengurus pilgub 2018 jadi fokus kita ke pilgub 2018 dulu.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Untuk menjalankan program perlunya koordinasi dari beberapa aktor tersebut agar dapat mengimplementasikan program Rumah Pintar

Pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Ariansyah Mustafa, S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas, bahwa:

“Koordinasi yang kami bangun selama ini masih bersifat prosedural, dalam artian sesuai dalam tataan aturan perundang-undangan yang ada. Seperti misalnya kemarin saat *launching* melalui surat. KPU Kota Batu berkoordinasi dengan beberapa sekolah untuk hadir melalui prosedur birokrasi dengan surat menyurat.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Setelah melihat aktor dan bagaimana koordinasi antar aktor.

Para aktor terlibat pasti mempunyai sasaran yang sama guna tercapainya tujuan secara tepat. Lembaga yang mempunyai suatu program, sudah pasti juga mempunyai kelompok sasaran yang akan menerima sebuah dampak dari program tersebut. Dilandaskan pada hal tersebut Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, mengatakan bahwa:

“jadi begini ya Rumah Pintar Pemilu ini *kan* untuk pendidikan pemilih, maka dari itu kelompok yang menjadi penting dalam pendidikan pemilu itu melalui Rumah Pintar Pemilu adalah pemilih pemula. Pemilih pemula itu *kan* mereka yang umurnya 17-23. *Nah* kalau diliat dari umurnya ini umur 17 anak SMA kelas 3. Kalau sampai umur 23 berarti bisa jadi Mahasiswa dan pekerja muda. Namun disini sasarannya adalah lebih kepada mereka pemilih pemula yang masih di bangku sekolah atau bisa disebut Pemilih Muda. Mengapa pemilih pemula? Karena mereka baru pertama kali menggunakan hak suara mereka. Selain itu sasarannya juga kepada pra pemilih. Waktu peresmian ini makanya diundang anak-anak SD untuk datang supaya mereka memahami sejak dini mengenai pemilu dan demokrasi. Tapi dari KPU RI sendiri sebenarnya sasaran dari Rumah Pintar Pemilu ini seluruh masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Adapun jumlah pemilih pemula yang ada di Kota Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Jumlah Pemilih Pemula di Kota Batu

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pemula		
		L	P	L+P
1	BATU	1.000	961	19.61
2	BUMIAJI	643	564	1.207
3	JUNREJO	499	504	1003
TOTAL		2.142	2.029	4.171

Sumber: Data KPU Kota Batu

Jika dilihat dari ketiga wawancara dan data tersebut kesimpulan yang didapat adalah bahwa aktor yang terlibat dalam pendidikan pemilih adalah Pemerintah Kota Batu, Partai Politik, KPU Kota Batu, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan pendidik. Namun untuk pendidikan pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu aktor yang berperan atau pelaksana program adalah KPU Kota Batu dan Pendidik. KPU Kota Batu bertanggung jawab sebagai penyelenggara dan pendidik bertanggung jawab untuk mengajak para siswanya untuk datang ke Rumah Pintar Pemilu. Selanjutnya pendidik akan berkomunikasi dengan KPU Kota Batu untuk meminta para siswanya diedukasi mengenai pemilu melalui Rumah Pintar Pemilu atau sebaliknya dengan surat menyurat. Adapun sasaran dari pelaksana program Rumah Pintar Pemilu adalah seluruh masyarakat, namun lebih difokuskan kepada pemilih pemula yang masih duduk di bangku sekolah dan pra pemilih.

2) *Standard Operating Procedure* (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman bagi para aktor atau pelaku program dalam melaksanakan sebuah program agar para pelaku mengetahui apa yang harus dilakukan dan disiapkan dalam merealisasikan Rumah Pintar Pemilu. Sesuai pernyataan diatas Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, mengungkapkan bahwa:

“Mengenai SOP ini, biar jelas awalnya saya beritahu dulu landasannya terbentuk Rumah Pintar Pemilu ini. Jadi ada surat edaran dari KPU RI dimana seluruh KPU kabupaten atau kota yang ada di Indonesia ini harus membuat program Rumah Pintar Pemilu dengan memanfaatkan ruang yang ada di KPU masing-masing *mas*. Setelah ada surat edaran tersebut perwakilan dari seluruh KPU di Indonesia diundang untuk datang dalam sosialisasi pembentukan Rumah Pintar Pemilu waktu itu di Bali. Nah disana kita dikasih pemahaman bagaimana materi yang harus disiapkan, anggaran yang ditetapkan dan lain-lain. Lalu kita diberikan satu persatu buku pedoman Rumah Pintar Pemilu yang dibuat oleh pusat untuk menjadi bahan acuan dalam pembuatan Rumah Pintar Pemilu ini. Jadi misalkan *mas* tanya tentang SOP yang kita pakai untuk dasar acuan itu buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu dari pusat *mas*. Didalam buku pedoman itu ada lingkup materi yang harus disediakan, manajemen pengelolaan, tata ruangnya bagaimana, sarana dan prasarana, tujuan dan juga sasarannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Sejalan dengan hal tersebut Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kota Batu mengatakan bahwa:

“Kita masih mengikuti Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu *mas* untuk menjalankan Rumah Pintar Pemilu ini. Kita juga menerapkan standar pelayanan umum dimana orang bertanya kami melayani. Seperti yang saya lakukan kepada *mas*.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Batu belum membuat *Standard Operating Procedure* (SOP)

untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu. Acuan KPU Kota Batu berdasarkan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu dari KPU RI.

3) Sumber Daya

Sumber daya menjadi aspek lain yang penting untuk diperhatikan dalam mengimplementasikan program supaya menjamin tercapainya suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Suatu program sejatinya tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia, keuangan dan sarana maupun prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, program Rumah Pintar Pemilu supaya berjalan dengan baik perlu adanya dukungan dari aspek sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai. Berikut merupakan penjelasan mengenai sumber daya yang penting untuk ditinjau:

a) Sumber Daya Keuangan

Ditinjau dari sumber daya keuangan yang digunakan dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu ini berasal dari APBN seperti yang dikatakan oleh Bapak Ariansyah Mustafa, S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas:

“Sumber dana untuk mewujudkan Rumah Pintar Pemilu berdasarkan peraturan itu dari negara melalui APBN yang ditujukan untuk KPU dan dari hibah APBD setempat. Sebenarnya *mas*, pendidikan pemilih sudah dilakukan sebelum adanya Rumah Pintar Pemilu melalui diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Namun *kan* namanya anggaran harus ada wujudnya. Maka dari itu dibuatlah Rumah Pintar Pemilu. Daripada dianggap sebagai dana siluman *mas*.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Selain itu Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat juga mengatakan bahwa:

“Rumah Pintar Pemilu ini dari APBN melalui KPU RI lalu dicairkan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kalau untuk hibah APBD setempat belum ada mas. Sampai sekarang ini masih menggunakan APBN saja” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dana program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu berasal dari APBN melalui KPU RI dan ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Adapun secara lebih terinci pendanaan dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu adalah sebagai berikut:

SATKER	Kegiatan	PILOT PROJECT		NON PILOT PROJECT	
		Pilkada	Tidak Pilkada	Pilkada	Tidak Pilkada
		ANGGARAN			
PROVINSI	1 Konsolidasi Program Parmas	Rp 57.000.000	Rp 40.000.000	Rp 49.000.000	Rp 52.000.000
	2 Fasilitasi Pendidikan Pemilih	Rp 57.000.000	Rp 58.000.000	Rp 58.000.000	Rp 57.000.000
	3 Riset Partisipasi Pemilih	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
	4 Pembentukan dan Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Rp 40.000.000	Rp 20.000.000	-	-
	TOTAL	Rp 194.000.000	Rp 158.000.000	Rp 147.000.000	Rp 149.000.000
KABUPATEN/KOTA	1 Fasilitasi Pendidikan Pemilih	-	Rp 102.000.000	Rp 15.000.000	-
	2 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	-	Rp 27.000.000	-	-
	TOTAL		Rp 129.000.000	Rp 15.000.000	

Gambar 8. Anggaran Rumah Pintar Pemilu

Sumber: Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa anggaran Rumah Pintar Pemilu Provinsi berbeda dengan anggaran Rumah Pintar Pemilu di Kabupaten/Kota. KPU Kota Batu sendiri berada pada

tabel *Pilot Project* pada kolom Kabupaten/Kota. KPU Kota Batu menerima anggaran sebesar Rp. 129.000.000., untuk fasilitasi pendidikan pemilih sebesar Rp. 102.000.000., sedangkan untuk Rumah Pintar Pemilu hanya Rp. 27.000.000., Akan tetapi, hal tersebut masih belum dapat dikatakan cukup untuk mendukung pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu. Hal ini mengacu pada penjelasan dari Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa:

“*gimana ya mas, sebenarnya mas bisa lihat sendiri bagaimana kondisi kami selaku penyelenggara Rumah Pintar Pemilu. Kalau dibilang cukup sih belum mas, Cuma ya kita harus cukup cukupin untuk jadi Rumah Pintar Pemilu ini. Karena program ini kan wajib untuk dijalankan mas*” (Hasil wawancara pada 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Selaras dengan pernyataan diatas Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa:

“Bagi kami besar kecilnya anggaran yang kami terima itu harus cukup atau maksimal kita berdayakan untuk pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu, meskipun jika sebenarnya tidak mencukupi cara kami mengatasinya dengan lebih mengefektifkan teknologi yang ada misalnya melalui media sosial atau pembuatan Rumah Pintar Pemilu secara digitalisasi.” (Hasil wawancara pada 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sejauh ini anggaran yang diterima KPU Kota Batu untuk merealisasikan Rumah Pintar Pemilu masih kurang memadai, namun KPU Kota Batu mencoba untuk menggunakan anggaran semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan program Rumah Pintar Pemilu.

b) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan dan macam sarana dan prasarana yang digunakan juga menjadi salah satu hal yang diprioritaskan untuk menunjang kesuksesan implementasi sebuah program khususnya program Rumah Pintar Pemilu. Sarana yang ada pada program Rumah Pintar Pemilu semuanya berhubungan dengan pelayanan edukasi yang akan diberikan kepada sasaran. Adapun sarana yang disediakan oleh KPU Kota Batu untuk melakukan edukasi sesuai dengan Laporan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu dan Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Sarana Rumah Pintar Pemilu

No	Jenis	Jumlah
1.	Banner Informasi Pemilu	18 unit
2.	<i>Soundsystem</i>	1 set
3.	Proyektor dan layarnya	1 unit
4.	LCD <i>screen</i>	1 unit
5.	Lemari Dokumen	1 unit
6.	Maket TPS	1 unit
7.	Laptop	1 unit
8.	Pendingin Ruangan (AC)	4 unit
9.	Peralatan Simulasi Pemilu	5 unit
10.	Buku-buku mengenai Pemilu	±10 unit

Sumber: Laporan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu (diolah peneliti)

Data tersebut didukung oleh gambar dilapangan sebagai berikut:



Gambar 9. Banner Informasi Pemilu

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 10. Maket TPS

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 11. Buku-Buku Mengenai Pemilu

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Selaras dengan data dan gambar tersebut Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa:

“Pada umumnya sarana yang kita sediakan disini sama seperti yang ada pada buku pedoman Rumah Pintar Pemilu. *Kan* disini acuan kita untuk mewujudkan Rumah Pintar Pemilu itu *kan* hanya buku itu. Kalau secara sarana yang kita miliki untuk mendukung saya rasa sudah cukup baik. Sudah sesuai dengan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

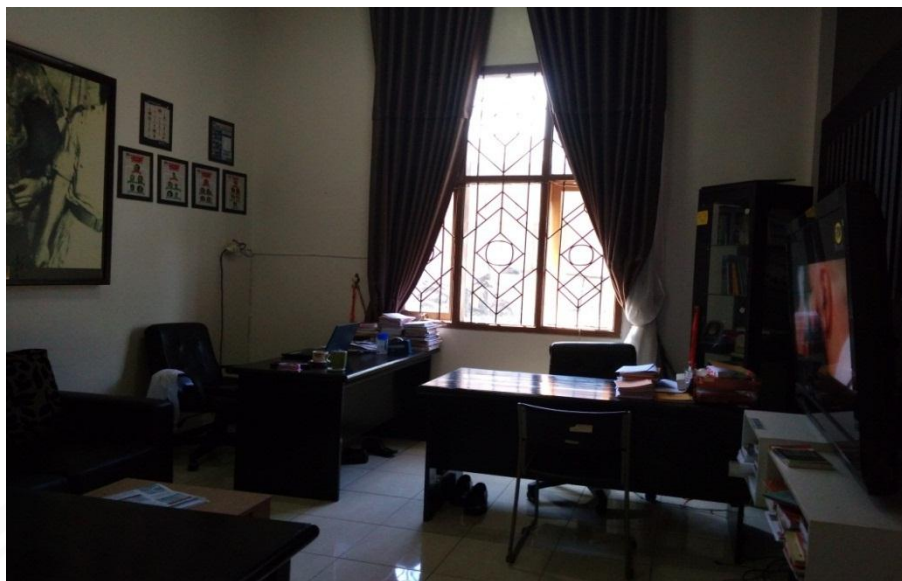
Informasi lain juga dikatakan oleh Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas bahwa:

“Untuk sarana saya rasa sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah kita sudah memanfaatkan anggaran dengan baik buat *nyediain* apa saja yang *dibutuhin*.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Dari hasil kedua wawancara tersebut sarana yang dimiliki oleh KPU Kota Batu untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu sudah sesuai dengan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu. KPU Kota Batu sudah merasa cukup untuk dapat mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu dengan memaksimalkan sarana yang dimiliki. Berbeda dengan sarana, prasarana yang dimiliki oleh KPU Kota Batu untuk mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu masih terbatas, hal ini dikatakan oleh Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat sebagai berikut:

“Untuk prasarana yang harus disediakan dalam program ini dalam bentuk ruang. Karena *kan* dari awal sudah saya katakan bahwa program ini memanfaatkan ruang yang ada di KPU Kota Batu. *Nah* ruang itu seperti ruang *audio visual*, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi. Disini yang membuat program ini tidak berjalan maksimal adalah ruang yang kita miliki ini masih terbatas. Jadi ruang yang seharusnya untuk Rumah Pintar Pemilu kalau lagi ga ada kunjungan kita gunakan sebagai kantor. Seperti ruang *audio visual* dan ruang simulasi.” (Hasil wawancara pada 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Pernyataan ini didukung oleh kenyataan dilapangan seperti yang ada pada gambar sebagai berikut:



Gambar 12. Ruang Audio Visual menjadi Ruang Kerja Komisioner KPU

Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 13. Ruang Simulasi menjadi Ruang Rapat

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Informasi lainnya juga didapat dari Bapak Sumantri sebagai tenaga honorer yang mengatakan bahwa:

“Kalau Rumah Pintar Pemilu ini berjalan kan yang diundang itu sekolah-sekolah *mas*, nah kadang-kadang para siswa itu kesini naik motor yang datang bisa sampai 2 sampai 3 kelas kalau misalkan satu kelas 40 orang *aja* berarti ada sekitar 120 orangan kesini dan kebanyakan pada naik motor. Lahan parkir kadang tidak

mencukupi” (Hasil wawancara 26 Februari 2018, pukul 09.00 WIB)

Dari beberapa hasil wawancara dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa prasarana yang ada di KPU Kota Batu dalam mengimplementasikan Rumah Pintar Pemilu masih jauh dari kata memadai. Dengan ruangan yang seadanya dapat digambarkan apabila program Rumah Pintar Pemilu sedang berjalan, ruang yang dibutuhkan akan dijadikan prasarana program. Sedangkan apabila program Rumah Pintar Pemilu sedang tidak berjalan maka ruang tersebut akan dijadikan ruangan kantor biasa atau menjadi ruang rapat. Dengan kata lain apabila ingin menjalankan program Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Batu harus bekerja lebih ekstra untuk menyiapkan ruangan dahulu.

Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di KPU Kota Batu untuk dapat mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu belum cukup baik. Bila ditinjau dari sarana yang dimiliki KPU Kota Batu sudah terpenuhi dengan baik. Sedangkan bila ditinjau dari prasarana yang dimiliki KPU Kota Batu masih jauh dari kata cukup karena ruang yang ada tidak mencukupi, maka ruangan yang ada menjadi ruang multi fungsi untuk kantor dan untuk mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu.

c) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Batu sebab tanpa sumber daya manusia baik, maka fungsi dari sumber daya yang lain tidak berjalan dengan baik. Secara umum sumber daya manusia dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu adalah seluruh aparatur yang ada di KPU Kota Batu.

Indikator untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu dengan baik dapat dilihat dari kondisi sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Batu dalam segi kuantitas dan kualitas aparatur yang dimiliki oleh KPU Kota Batu. Adapun segi kuantitasnya sumber daya manusia yang dimiliki KPU Kota Batu pada tahun 2017 hanya 30 orang. Sementara itu, bila ditinjau dari segi kualitasnya sumber daya manusia yang dimiliki KPU Kota Batu dapat ditinjau berdasarkan data tentang kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 12. Kondisi Kepegawaian KPU Kota Batu Menurut Latar Belakang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS	Honorar	Jumlah
1.	S 2	5	-	5 Orang
2.	S 1	12	1	13 Orang
3.	D IV	1	-	1 Orang
4.	D III	2	1	3 Orang
5.	S M A	3	5	10 Orang
TOTAL		23	7	30 Orang

Sumber: Laporan Kinerja KPU Kota Batu 2017 (sudah diolah peneliti)

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bila dilihat dari segi kuantitas pegawai yang dimiliki KPU Kota Batu total terdapat 30 orang, dimana 23 orang adalah PNS dan 7 orang adalah tenaga honorer. Sedangkan bila dilihat dari segi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki KPU Kota Batu baik PNS ataupun tenaga honorer sebagian besar menyelesaikan pendidikannya pada tingkat S1 (sarjana) dengan jumlah 13 orang. Tingkat pendidikan tertinggi pegawai KPU Kota Batu adalah S2 dengan jumlah 5 orang, sedangkan tingkat pendidikan terendah pegawai KPU Kota Batu ialah SMA dengan jumlah 5 orang. Tingkat pendidikan minoritas adalah D IV dengan jumlah hanya 1 orang.

Namun Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa:

“Program Rumah Pintar Pemilu ini berada langsung di bawah komando Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, sementara jumlah sumber daya manusia yang ada hanya 4 personil. *Nah* bagian teknis ada di bawah Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat. Kami disini juga diatur sesuai dengan kemampuan kita masing-masing *mas*. Jadi setiap orang dalam divisi teknis mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Jadi dengan perbedaan kemampuan yang ada kita semaksimal mungkin dapat meng-*handle* seluruh tugas yang ada dibagian teknis ini *mas*. Saya juga merasa sesungguhnya SDM untuk Rumah Pintar Pemilu ini masih belum cukup. Tapi karena ada kebijakan daerah yang mengatur tentang perampingan struktur dan aparatur jadi mau *gimana mas*. Oleh sebab itu kita juga butuh bantuan seperti dari kelompok masyarakat ataupun mahasiswa.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Rumah Pintar Pemilu ini dijalankan

oleh seluruh aparaturnya KPU Kota Batu yang berjumlah 30 orang. Namun secara teknis dan peraturan program Rumah Pintar Pemilu ini di bawah kewenangan Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang hanya memiliki sumber daya manusia berjumlah 4 orang. Jumlah tersebut dianggap belum cukup untuk mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu dengan baik.

Program Rumah Pintar Pemilu adalah pelayanan pendidikan oleh KPU Kota Batu, karena itu yang divisi yang menjalankan program Rumah Pintar Pemilu harus memahami lebih dulu materi dari Rumah Pintar Pemilu itu sendiri. Adapun beberapa materi yang disediakan sesuai dengan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Pemilu
2. Pentingnya Pemilu dan Demokrasi
3. Sistem Pemilu
4. Tahapan Pemilu
5. Peserta Pemilu
6. Proses Pemilihan
7. Profil Penyelenggara Pemilu
8. Uji Pengetahuan Pemilu

Selaras dengan data tersebut Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa:

“Jadi mereka yang datang ke Rumah Pintar Pemilu itu dapat pengetahuan tentang sejarah kepemiluan (mulai dari orde lama sampai dengan sekarang), ada nama-nama presiden dan wakil presiden mulai dari orde lama sampai sekarang, sistem demokrasi, kaitan demokrasi dengan pemilu, tahapan pemilu, peserta pemilu.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)”

Berdasarkan materi yang ada, divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat harus memahami lebih dahulu, namun Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa:

“tidak semua mengerti karena kita bekerja secara *team work* atau kelompok untuk bisa lebih menguasai dan lebih mendalam dalam hal *job disk* yang ada sebagaimana peraturan mengatur kami”
(Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh aparatur yang ada di divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat memahami tentang materi Rumah Pintar Pemilu karena ada pembagian tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari Rumah Pintar Pemilu. Dari seluruh pernyataan dan data mengenai sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Batu untuk mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu dapat disimpulkan bahwa, program Rumah Pintar Pemilu adalah kewenangan dari Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang secara kuantitas hanya memiliki 4 personil yang dirasa masih kurang untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu. Sedangkan secara kualitas dari 4 personil yang ada dibagi lagi menjadi beberapa tugas sesuai dengan *job disk* masing-masing. Maka dari itu tidak semua personil di divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat memahami materi yang akan disampaikan kepada sasaran dalam edukasi.

Secara keseluruhan sumber daya yang digunakan untuk mendukung implementasi program Rumah Pintar Pemilu memiliki

keterbatasan dari sisi kuantitas. Oleh sebab itu, adanya berbagai sumber daya yang digunakan tersebut dinilai masih belum memadai baik ditinjau dari segi sumber daya keuangan, sumber daya sarana dan prasarana, maupun sumber daya manusia.

4) Penetapan Manajemen Pelaksana Program

Penetapan Manajemen Pelaksana Program adalah bagaimana manajemen pelaksana kebijakan ini tekankan pada yang bertanggung jawab menjalankan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam program Rumah Pintar Pemilu manajemen pelaksana Program berdasarkan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan rumah pintar pemilu melekat pada Bagian Bina Partisipasi Masyarakat di KPU; Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas di KPU Provinsi; dan pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas di KPU Kabupaten/Kota. Seluruh tim kerja Rumah Pintar Pemilu memiliki fungsi tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan rumah pintar pemilu, termasuk *guide*, administrasi, dan teknis/operator.”

Selaras dengan data tersebut, Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa:

“Rumah Pintar Pemilu ini dipegang oleh bagian teknis *mas*. Untuk menjalankan program ini yang diberi tanggung jawab oleh ketua KPU Kota Batu adalah orang-orang (bagian) teknis *mas*. Namun juga seluruh aparatur disini juga ikut andil untuk terselenggaranya Rumah Pintar Pemilu ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Apabila ditinjau pada koordinasi dalam melaksanakan program sesuai dengan bagian pelaksana program yang sebelumnya diterangkan

pada Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu dan menurut Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas tentang cara KPU Kota Batu untuk koordinasi dengan aktor lain adalah sebagai berikut:

“koordinasi yang kami bangun selama ini masih bersifat prosedural dalam artian sesuai dalam tatanan aturan perundang-undangan yang ada, seperti misalnya melalui surat atau kegiatan yang mengumpulkan masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dan data mengenai pelaksanaan manajemen program dapat ditarik kesimpulan bahwa yang melaksanakan program Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Batu adalah Sub Bagian Teknis dan Hupmas, dibawah divisi SDM dan Partisipasi masyarakat dan menggambarkan pola kepemimpinan kolegal.

5) Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi pelaksanaan kebijakan”, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal kegiatan juga menjadi sebuah konsistensi dari pelaksana dalam mengimplementasikan suatu program. Penetapan jadwal yang ada pada Program Rumah Pintar Pemilu saat ini masih belum jelas dan tegas hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa:

“Kalau untuk jadwal pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu masih mengikuti atau menyesuaikan waktu antara pengunjung dengan kita, semua ini *kan* karena kita masih ada kegiatan lain bukan hanya

untuk Rumah Pintar Pemilu saja.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Informasi lain juga didapat dari Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa:

“Jadi kalau ada yang mau datang kesini kita lebih dulu surat menyurat lalu menentukan jadwal sesuai kesepakatan bersama dengan pihak yang mau berkunjung, target kami dalam setahun minimal empat kali kegiatan. Untuk sampai saat ini juga kita belum bisa menentukan jadwal karena kita masih memikirkan mengenai sosialisasi program ini gimana caranya agar menarik. Setelah itu mungkin kita akan membuat konsistensi jadwal” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Kejelasan yang ada mengenai jadwal pada program Rumah Pintar Pemilu hanyalah sebatas jam operasional dari Rumah Pintar Pemilu seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ariansyah Mustafa, S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas bahwa:

“Kalau untuk jam operasional program ini mengikuti jam kantor *mas*, Rumah Pintar Pemilu mulai beroperasi dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program Rumah Pintar Pemilu belum memiliki jadwal kegiatan yang jelas, pelaksanaan program masih bergantung kepada kesepakatan antara pihak pengujung dengan KPU Kota Batu sebagai penyelenggara hal ini dikarenakan ruangan yang dipakai sebagai ruang kerja KPU Kota Batu. Kejelasan yang ada hanya jam operasional yang mengikuti jam kantor.

c. Aplikasi Program

Aplikasi program adalah tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan. Adapun yang akan ditinjau dalam tahap ini adalah tahap persiapan implementasi dan pelaksanakan dari program Rumah Pintar Pemilu dapat dipaparkan sebagai berikut:

a) Persiapan program Rumah Pintar Pemilu.

Sebelum program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu siap untuk diaplikasikan secara nyata, maka terlebih dahulu dilakukan proses persiapan dengan tujuan untuk membuat program berjalan dengan baik dan dapat mencapai keberhasilan dalam proses implementasiannya. Dalam mempersiapkan program Rumah Pintar Pemilu, Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa:

“Ya *begini mas*, tentang persiapan itu diawal kita dan seluruh KPU seluruh Indonesia pada Mei 2016 dikumpulkan di Bali oleh KPU RI, tapi hanya perwakilan bagian teknis yang datang untuk mengikuti Rakornas Rumah Pintar pemilu. *Nah* di sana diberikan penyuluhan tentang latar belakang, tujuan, anggaran, konsep dan inovasi pengembangan dari program ini. Selanjutnya kita melakukan rapat koordinasi internal KPU Batu tentang hasil penyuluhan di Bali tersebut untuk menyamakan pemahaman tentang Rumah Pintar Pemilu dan memberi nama Rumah Pintar Pemilu di Kota Batu ini menjadi “Wisata Demokrasi” (Hasil wawancara 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa KPU Kota Batu hanya menjalankan program Rumah Pintar Pemilu yang

digagas oleh KPU RI. Segala hal yang mengatur tentang program ini sudah diberikan oleh KPU RI dalam Rapat Koordinasi Nasional di Bali.

Selanjutnya Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat juga menambahkan bahwa:

“Kalau tentang prosedur program ini kita mengikuti langsung apa yang di perintahkan oleh KPU RI. Karena kan ini sebenarnya inovasi dari KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota diberi anggaran untuk membuat program ini karena ini *kan* program nasional mas. Baru lah kita mulai pembentukan program Rumah Pintar Pemilu dengan menetapkan penempatan ruang yang harus disediakan, setelah itu kita memilah barang-barang prioritas yang sekiranya harus banget tersedia untuk awal- awal realisasi program ini, lalu memanfaatkan anggaran yang ada untuk menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan tadi, *trus* baru kita mulai menata ruangan, menyusun panel materi dan menambah materi lokal tentang pemilu. Setelah semuanya selesai kita mulai merencanakan *launching* sebagai langkah awal mengenalkan program Rumah Pintar Pemilu ini kepada masyarakat.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pada pukul 13.30 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam hal mempersiapkan program Rumah Pintar Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu adalah dengan melalui rapat koordinasi supaya dapat memanfaatkan anggaran yang sudah diberikan dan bagaimana mengatur tata ruangan dan segala kebutuhan penunjang untuk memberikan pendidikan kepada pemilih melalui program Rumah Pintar Pemilu.

b) Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu

Setelah dilakukannya persiapan untuk pembentukan program Rumah Pintar Pemilu, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pelaksanaan program. Dalam hal ini yang dilakukan oleh KPU Kota Batu adalah membuat sebuah *launching* program Rumah Pintar Pemilu yang

dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017 guna memperkenalkan program Rumah Pintar Pemilu kepada masyarakat. Seperti gambar berikut:



Gambar 14. Launching Rumah Pintar Pemilu

Sumber: Website KPU Kota Batu

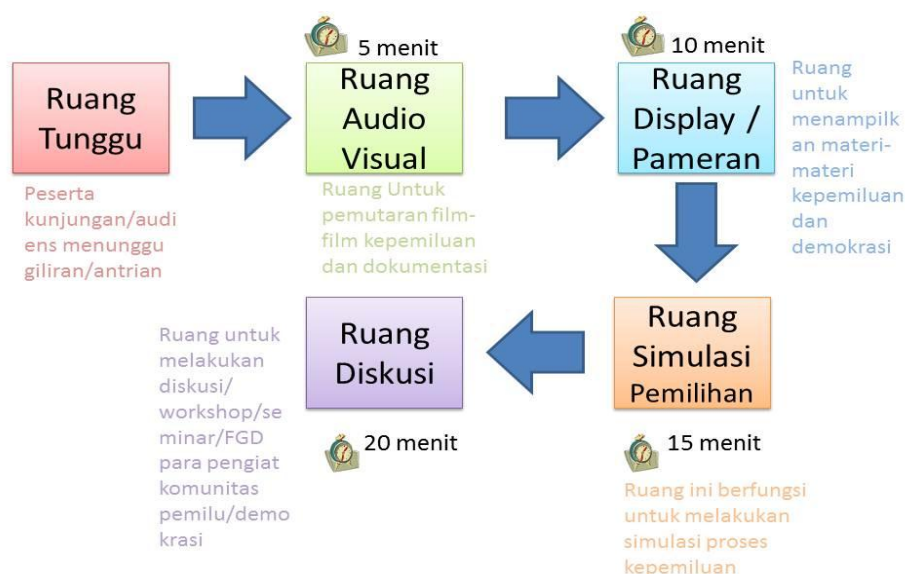
Selaras dengan gambar yang ada Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa:

“Jadi begini *mas* kami selaku penyelenggara pemilu. Acara apapun yang berkaitan dengan pemilu kita akan coba buat semenarik mungkin agar masyarakat mau untuk berkontribusi bersama dengan KPU. Saat Pilkada 2017 kemarin kita juga mengajak artis nasional untuk datang saat pembukaan masa kampanye. *Nah* tidak sampai disitu artis tersebut juga kita ajak ke sekolah-sekolah atau daerah-daerah di Kota Batu untuk ikut mensosialisasikan pemilu bersih. Begitu juga dengan Rumah Pintar Pemilu ini. Disini kami mengundang beberapa sekolah, Bapak Wali (Pak Edy Rumpoko), perwakilan kepolisian, dan ada juga Komisioner dari KPU Provinsi Jawa Timur pak Gogot. Pokoknya kita berusaha membalut peresmian ini dengan menarik seperti menampilkan beberapa kesenian yang ada di Jawa Timur agar masyarakat bisa mengetahui kalau ada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Batu.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Berbanding terbalik dengan pernyataan diatas Dwi Prasetyo sebagai siswa SMAN 2 Kota Batu yang datang untuk mendapatkan edukasi dari Rumah Pintar Pemilu mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kita sangat senang bisa diundang oleh KPU untuk datang ke acara peresmian itu. Karena *kan* hanya beberapa siswa dari beberapa sekolah jadi kami punya rasa senang tersendiri karena terpilih bisa hadir disana. Tapi juga sedikit yang datang jadi *kan* tidak semua orang tahu tentang Rumah Pintar Pemilu. Tapi sebenarnya saya ngerasa *gimana* ya *mas* kaya kurang begitu *pas* penyampaian, kaya ada yang tidak tersampaikan, sekelibat saja penyampaiannya. Karena waktunya juga kurang *kan*, jadi *pas* itu acaranya aja molor seharusnya mulai jam 8 pagi tapi siang baru mulai. Tapi dari waktu yang terbatas itu juga saya bisa dapatkan ilmu seerti mengenai *money* politik dan organisasi yang berkecimpung di dalam pemilu dan tanggung jawabnya. Jadi saya bisa memberitahu ke keluarga dan lingkungan disekitar saya kalau diberi uang untuk disuruh mencoblos si A misalnya jangan mau. (Hasil wawancara pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 12.15 WIB)

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa saat peresmiannya memang yang dilakukan oleh KPU Kota Batu mencoba untuk memberikan suasana yang menarik agar masyarakat tahu bukan hanya pemilih pemula saja. Namun, yang dirasakan sasaran adalah masih kurangnya penyampaian yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dalam menyelenggarakan edukasi melalui Rumah Pintar Pemilu, bahkan masih ada warga sekitar KPU Kota Batu yang belum mengetahui bahwa ada Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu di dekat tempat tinggalnya. Namun sasaran yang sudah pernah diedukasi dalam program Rumah Pintar Pemilu memiliki tingkat pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi yang bertambah. Adapun alur dalam penyampaian Rumah Pintar Pemilu adalah sebagai berikut:



Gambar 15. Alur Kunjungan Rumah Pintar Pemilu

Sumber: Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu

Sejalan dengan gambar diatas Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat menyampaikan bahwa:

“begitu mereka datang itu, *kan* ada di lantai dua ya, disana itu ada terkait sejarah kepeiluan, didalam lantai dua itu ada panel-panel yang berisi tentang sejarah pemilu mulai dari orde lama, orde baru, sampai reformasi sekarang ini. Termasuk juga siapa presiden dan wakil presiden mulai orde lama itu ada semua. *Nah* kemudian setelah mengenai sejarah kepeiluan. Disana juga ada masalah sistem demokrasi penjelasannya seperti apa, jadi kenapa pentingnya pemilu dan demokrasi, termasuk sistem pemilu, terus tahapan pemilu. Jadi mulai tahap persiapan sampai pemungutan dan perhitungan itu ada semua. Lalu ada lagi peserta pemilu (partai politik) dari masa orde lama sampai tahun 2014 ini ada termasuk juga didalam ruang ini ada maket TPS. Dimaket tersebut mereka bisa tau apa saja yang di dalam TPS seperti bilik coblos, tempat penyerahan DPT, dan setelah mencoblos harus mencelupkan jari ke dalam tinta” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Dari data dan wawancara yang ada dapat disimpulkan tentang alur penyampaian pendidikan pemilih dan demokrasi yang dilakukan

oleh KPU Kota Batu adalah pertama pengunjung berada di ruang tunggu untuk menunggu giliran, setelah tiba gilirannya pengunjung atau sasaran masuk ke ruang *audio visual* untuk menonton film mengenai kepemiluan, selanjutnya pengunjung akan masuk ke ruang *display* atau pameran disana terdapat beberapa papan informasi dan buku tentang kepemiluan ataupun demokrasi. Berikutnya pengunjung akan memasuki ruang simulasi untuk mencoba tata cara pencoblosan yang baik dan benar. Terakhir pengunjung akan berdiskusi seputar ilmu yang mereka dapatkan selama menjalani edukasi di Rumah Pintar Pemilu ini di dalam ruang diskusi.

Kenyataan yang ada dilapangan dalam realisasinya program Rumah Pintar Pemilu hanya melakukan pendidikan pemilih satu kali saja dan itu pun saat peresemian. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa:

“program ini itu sebenarnya *kan* baru satu tahun ya mas. Lagipula sebenarnya program ini perwujudan dari anggaran pendidikan pemilih yang ada di seluruh KPU di Indonesia biar jelas. Lalu program ini memang menjadi prioritas kita sudah mewujudkan program ini. Namun kita untuk sekarang lebih kepada *KPU Go To School*, mengapa demikian? Karena kita ini lagi sibuk untuk persiapan Pilgub nanti, *mas* bisa lihat sendiri ruangan yang seharusnya untuk Rumah Pintar Pemilu juga sedang dipakai untuk ruang kerja. Berhubung keterbatasan ruang yang dimiliki oleh kami memilih untuk menjalankan *KPU Go To School*. Tapi memang secara pribadi saya menganggap program ini belum berjalan dengan baik. Target kita satu tahun 4 kali penyelenggaraan pendidikan di Rumah Pintar Pemilu ini *mas*. Saya dengan Pak Saifudin masih berfikir bersama untuk mencari konsep yang terbaik untuk Rumah Pintar Pemilu ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Selain itu Ibu Nuning Sri Wahyuni, selaku staff divisi partisipasi masyarakat mengatakan bahwa:

“Iya untuk saat ini belum ada yang data berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu ini *mas* jadi datanya belum ada *mas*. Lagian *kan* juga belum satu tahun, ada data sekolah yang pernah datang itu sama seperti daftar hadir untuk sekolah yang datang saat peresmian program Rumah Pintar Pemilu ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 12.00 WIB)

Informasi lain juga di dapat dari Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mengatakan bahwa:

“Ya kalau dibiliang baik ya baik *mas* sebenarnya. Kita itu lewat *KPU Go To School* nanti *kan* juga memberi ilmu tentang cara mencoblos. Tapi kalau mau lebih dalam mengetahui pemilu *kan* silahkan datang ke Rumah Pintar Pemilu ini. Memang belum maksimal *mas* kita bekerja dengan anggaran dan ruang seadanya. Tapi kita mencoba untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mempublikasikan dulu Rumah Pintar Pemilu ini kepada masyarakat *kan*. Kita akan membuat brosur dan membuat *e-RPP* (Rumah Pintar Pemilu). Mengapa *e-RPP* karena kondisi ruang dan sumber daya disini yang kurang maka kita medigitalisasikan Rumah Pintar Pemilu agar masyarakat bisa belajar tanpa harus datang kesini. Setelah sosialisasi dan publikasi ini sudah mencakup masyarakat luas mungkin kita akan merealisasikan program ini dengan baik.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU Kota Batu merealisasikan program Rumah Pintar Pemilu hanya sekali hanya saat peresmian saja, padahal target dari KPU Kota Batu untuk Rumah Pintar Pemilu dalam setahun akan direalisasikan empat kali. Pernyataan ini didukung oleh tabel mengenai daftar hadir beberapa sekolah yang datang saat peresmian Rumah Pintar Pemilu:

Tabel 13. Daftar Sekolah yang Pernah Berkunjung saat *Launching*

No.	Nama Sekolah	Hadir	
		Guru	Siswa
1	SMKN 2 BATU	1	5
2	SMKS 17 AGUSTUS BATU	1	5
3	SMKN 3 BATU	1	5
4	SMKN 1 BATU	-	-
5	SMAN 1 BATU	1	5
6	SMKS EDITH BATU	-	-
7	SMKS ISLAM BATU	1	5
8	SMAS ISLAM BATU	1	5
9	SMAS SELAMAT PAGI BATU	1	5
10	SMAS IMANUEL BATU	1	5
11	SMKS WIYATA HUSADA	-	-
12	SMAS MUHAMMADIYAH 3 BATU	-	-
13	SMKS BHINEKA TUNGGAL IKA	-	-
14	SMKS KESEHATAN AMANAH HUSADA	1	5
15	SLB EKA MANDAR BATU	1	5
16	SMAS AL-IZZAH BATU	-	-
17	SMKS MAARIF BATU	-	5
18	SMAN 2 BATU	-	5

19	SMAS PGRI BATU	1	5
20	SMKS PUTIKECWARA BATU	-	5
21	SMKS MUHAMMADIYAH 1 BATU	-	5
22	SMKS BRAWIJAYA BATU	-	-
23	SMAS KATOLIK YOS SUDARSO BATU	-	5
24	SMAS ISLAM ASYIM ASY'ARI BATU	-	-
25	SLB NEGERI BATU	1	5
TOTAL		12	85

Sumber: Data KPU Kota Batu setelah diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa saat peresmian Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Batu mengundang 25 sekolah yang ada di Kota Batu. Dari seluruh sekolah yang diundang terdapat 8 sekolah yang tidak datang dan 17 sekolah yang datang. Dari 17 sekolah yang datang, 5 diantaranya siswa datang tanpa didampingi oleh guru. Dan selanjutnya total terdapat 85 siswa yang hadir dari beberapa SMA maupun SMK yang ada di Kota Batu dalam peresmian dan sekaligus merupakan satu-satunya realisasi dari program Rumah Pintar Pemilu.

Berdasarkan seluruh pernyataan mengenai aplikasi program Rumah Pintar Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dapat disimpulkan bahwa belum teraplikasikan dengan baik pertama hanya

dilakukan satu kali setelah berjalan lima bulan peresmian program ini. Kedua, saat penyampaian materi yang dilakukan masih terlalu tercepat, tidak sesuai dengan yang ada di buku pedoman pemilu yang dikarenakan ketelatan acara saat dimulai. Akan tetapi walaupun dalam pelaksanaannya belum maksimal, sesuai dengan tujuan awal pembentukan Rumah Pintar Pemilu supaya sasaran setelah selesai diedukasi maka ilmu tentang kepemiluan dan demokrasi akan meningkat sudah terealisasi dengan baik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya Pendidikan untuk Pemilih milik KPU Kota Batu

Dalam setiap mengimplementasikan suatu program pasti terdapat sebuah faktor yang bersifat baik untuk mendukung kesuksesan program tersebut dan ada pula faktor yang bersifat buruk yang akan menghambat atau membuat suatu program kepada kegagalan. Faktor pendukung dan penghambat akan mempengaruhi jalannya proses implementasi dari program tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dalam program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Implementasi program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu didukung oleh berbagai faktor selama proses pelaksanaannya, sehingga hal ini menjadi suatu nilai tambah tersendiri untuk mengimplementasikan

program Rumah Pintar Pemilu. Adapun, faktor pendukung yang ditemukan selama pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu adalah sebagai berikut:

1) Faktor Teknologi

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju segala sesuatu dianggap lebih baik apa bila dapat memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk mendukung suatu program. Begitupun dengan program Rumah Pintar Pemilu teknologi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam mensosialisasikan program Rumah Pintar Pemilu, KPU Kota Batu menggunakan teknologi internet untuk dapat mempublikasikan adanya Rumah Pintar Pemilu. Selain itu juga teknologi yang ada dapat membantu KPU Kota Batu untuk menyampaikan pendidikan kepemiluan dan demokrasi kepada sasaran. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ariansyah Mustafa, S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa:

“Kami sebagai penyelenggara pemilu memanfaatkan teknologi ini untuk mempublikasikan apa saja yang dilakukan oleh KPU dan juga sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai pemilu dan juga Rumah Pintar Pemilu. Seperti yang saya katakan tadi *mas* kami juga mensosialisasikan Rumah Pintar Pemilu ini lewat *website*, *Youtube* KPU Kota Batu, *facebook*, dan *twitter*. Dan kedepannya juga kita *kan* akan membuat sebuah terobosan agar masyarakat tidak perlu datang ke Rumah Pintar Pemilu cukup melihat *web* kami.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi mendukung proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu terkait program Rumah Pintar Pemilu dan kedepannya KPU akan mendigitalisasikan program Rumah Pintar Pemilu.

2) Faktor Materi Rumah Pintar Pemilu

Materi dalam penyampaian pendidikan merupakan hal yang harus disiapkan dan dimengerti dahulu oleh penyelenggara pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan mengenai kepemiluan dan demokrasi merupakan salah satu tanggung jawab dari KPU di seluruh Indonesia. Materi yang ada dalam program Rumah Pintar Pemilu sebagian besar sudah disediakan oleh KPU RI karena terdapat konten bersifat nasional. KPU Kota Batu hanya menambahkan sedikit materi lokal seperti kepemiluan di Jawa Timur dan yang terpenting di Kota Batu sendiri. Pemaparan diatas didukung oleh pernyataan Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat menyatakan bahwa:

“Materi-materi KPU RI semua *kan*. Materi-materi atau konten-konten sejarah kepemiluan baru yang daerah KPU Batu menambahkan konten-konten lokal terkait pilkada, pilgub, perolehan suara yang ada di kabupaten kota. Tapi secara umum itu KPU RI semua seluruh Indonesia sama.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30)

Pernyataan ini juga didukung oleh dokumen milik KPU Kota Batu yang berjudul “Materi Konsep Rumah Pintar Pemilu Rakornas Bali” yang didalamnya terdapat materi pentingnya demokrasi dan pemilu, sejarah pemilihan umum di Indonesia, sistem pemilihan umum di Dunia, peserta pemilu mulai dari tahun 1955-2014, penyelenggara pemilu, tahapan penyelenggaraan pemilu, pejabat KPU RI periode 2012-2017, pemungutan dan perhitungan suara, denah pemungutan suara, presiden dan wakil presiden RI dari masa ke masa. Berdasarkan hasil

wawancara dan data yang dimiliki oleh KPU Kota Batu bahwa materi yang akan disampaikan melalui program Rumah Pintar Pemilu sebagian sudah disediakan oleh KPU RI. Hanya materi daerah yang perlu dipersiapkan oleh KPU Kota Batu.

b. Faktor Penghambat

Implementasi program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu juga mempunyai faktor yang dapat menghambat dalam proses pelaksanaannya, sehingga hal ini menjadi suatu kekurangan tersendiri untuk mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu. Adapun faktor penghambat dalam mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu adalah sebagai berikut:

1) Faktor Anggaran

Anggaran yang dimiliki suatu lembaga untuk menjalankan sebuah program harus disesuaikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Anggaran yang telah diberikan harus berwujud karena setiap pengeluaran anggaran terdapat pertanggung jawaban yang harus dibuat dalam bentuk laporan. Namun dalam program Rumah Pintar Pemilu anggaran yang didapatkan masih terbilang kurang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat menyatakan bahwa:

“iya mengenai anggaran *kan* kita hanya bersumber dari KPU RI selama ini. *Nah* dengan jumlah segitu yang diberikan masih kurang *mas*. Cuma ya mau *ga* mau kita cukup-cukupin karena bagaimana pun program ini harus terwujud dan akhirnya jadi kaya *gini mas*. Sebenarnya *sih* kita bisa membuat CSR kepada pihak ketiga, dalam bentuk barang kepada pihak swasta. Dan ada juga sumber daya hibah,

yang dimaksud disini bisa dari patungan para ibu-ibu PKK, pemberian dari pemerintah atau semacamnya. Namun sampai sekarang hanya dari KPU RI itu aja yang kita dapat.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Pernyataan ini juga di dukung oleh Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa:

“Ya benar mengenai anggaran kita ini bener-bener dituntut sebagai penyelenggara dari Rumah Pintar Pemilu ini bukan hanya menjalankan tapi juga mengembangkan program ini. *Nah* anggaran yang ada sekarang ini mungkin sudah kita maksimalkan untuk pembuatan Rumah Pintar Pemilu ini namun belum cukup untuk bisa mengembangkan program ini.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran yang bersumber dari KPU RI dalam pembentukan program Rumah Pintar Pemilu yang diterima oleh KPU Kota Batu sebetulnya masih kurang, namun tetap dimaksimalkan sebaik-baiknya. Anggaran yang diterimapun juga belum untuk mengembangkan program Rumah Pintar Pemilu. Dengan jumlah anggaran yang terbatas akan mempengaruhi proses pelaksanaan program kepada sasaran menjadi terbatas. Oleh sebab itu, adanya keterbatasan anggaran tersebut dapat menghambat proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu.

2) Faktor Prasarana

Faktor yang menjadi penghambat pengimplementasian program Rumah Pintar Pemilu selain dari segi anggaran juga prasarana yang ada. Kalau melihat sarana yang ada di Rumah Pintar Pemilu sudah baik. Sedangkan dalam segi prasarana masih jauh dari kata baik. Seperti yang

dikatakan oleh Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi menyatakan bahwa:

“Kalau penghambatnya menurut saya ruangnya menjadi satu dengan aula. Jadi kalau ada kegiatan yang menggunakan aula kita tahan dulu Rumah Pintar Pemilu. *Makanya* mereka yang ingin datang ke Rumah Pintar Pemilu kita bersurat dulu untuk menyamakan jadwal.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Sejalan dengan pernyataan tersebut Bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa:

“Dalam penyelenggaraanya yang sangat-sangat menjadi kendala untuk saat ini adalah ruangan di KPU ini ya *mas*. KPU mempunyai ruangan yang tidak banyak dan sudah punya fungsi masing dari ruangan tersebut. Karena program ini termasuk program pemanfaatan ruang jadi kita harus bisa membuat ruangan disini jadi multifungsi *mas*. Jadi kalau lagi ada kegiatan seperti mengundang parpol dan ada pertemuan dengan kelompok masyarakat aula itu kita pakai jadi ruang pertemuan. Kalau tidak baru bisa untuk menjalankan Rumah Pintar Pemilu. Ini yang menjadi hambatan belum lagi kita akan ada *event* pilgub 2018 nanti. Jadi sejatinya ruangnya kita prioritaskan untuk ruang kerja. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00)

Dapat dipahami dari beberapa wawancara diatas bahwa ruangan yang digunakan untuk program Rumah Pintar Pemilu ini kerap berbenturan jadwal dengan fungsi sebagai ruang kerja. Ini yang menyebabkan program Rumah Pintar Pemilu tidak berjalan dengan baik karena jika ingin merealisasikan program Rumah Pintar Pemilu, KPU Kota Batu harus merubah dahulu ruang kerja dan aula menjadi ruang untuk edukasi Rumah Pintar Pemilu. Oleh sebab itu, keterbatasan prasarana tersebut dapat menghambat proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu.

3) Faktor Kurang Antusias Masyarakat

Masyarakat sebagai sasaran dari program yang diselenggarakan oleh lembaga negara harus mengetahui lebih dahulu apa saja program yang ada di suatu lembaga. Dengan kata lain apabila masyarakat mengetahui dan menyambut dengan baik program yang diselenggarakan maka akan menimbulkan komitmen yang baik antara penyelenggara dan sasarannya. Namun tidak pada program Rumah Pintar Pemilu, banyak masyarakat yang merasa biasa saja akan hadirnya program Rumah Pintar Pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ariansyah Mustafa, S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa:

“Tidak seluruh masyarakat mengetahui dan merasa antusias mengenai program Rumah Pintar Pemilu ini. Ini diluar ekspektasi dari kami ya *mas* sebagai penyelenggara ya walaupun ada juga yang ngerasa senang. Tanggapan mereka masih minim tapi *insyaAllah* jika sudah pernah ke Rumah Pintar Pemilu ini mereka sangat terbantu khususnya bagi mahasiswa dalam mengumpulkan data untuk risetnya” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Informasi lain juga diberikan oleh oleh Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bahwa:

“Jadi memang ada respon masyarakat itu yang *wes* pemilu itu *yo ngono iku makanya* dia biasa saja tidak antusias, ini saya mau bikin brosur tentang Rumah Pintar Pemilu yang isinya konten-konten lalu saya kirim ke sekolah-sekolah. Rencananya seperti itu. (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Sejalan dengan kedua wawancara tersebut Bapak Sumantri mengatakan bahwa:

“Karena sasarannya yang dituju itu *kan* pemilih pemula. *Nah* sekolah-sekolah *kan* sedang persiapan untuk ujian khususnya kelas 3 SMA,

nah mereka sedang persiapan ujian. (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pada pukul 10.00 WIB)

Selain penyelenggara yang merasa kurang respon dari masyarakat Dwi Prasetyo sebagai siswa SMAN 2 Kota Batu juga mengatakan bahwa:

“Biasa saja *mas*, tapi ya bangga juga karena kan hanya beberapa siswa yang diundang datang ke KPU waktu itu.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 12.15 WIB)

Berdasarkan hasil beberapa wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa respon dari masyarakat terhadap hadirnya Rumah Pintar Pemilu dianggap masih kurang baik. Respon yang kurang dalam penyelenggaraan program akan membuat keterlibatan masyarakat terhadap program ini rendah dan pada kenyataan dilapangan memang program ini tidak terlalu menarik untuk dikunjungi. Oleh sebab itu, respon dari masyarakat yang kurang antusias dapat menghambat proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu.

4) Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program. Sumber daya manusia dalam implementasi program disamping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran perintah dari atasan. Namun pada program Rumah Pintar Pemilu sumber daya manusia menjadi faktor penghambat karena jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kota Batu untuk menjalankan

program ini dirasa masih kurang. Seperti yang dikatakan oleh bapak Ariansyah Mustafa,S.IP selaku Kasubbag Teknis dan Hupmas bahwa:

“Kalau bicara sumber daya manusia yang kita miliki dalam divisi ini hanya 4 orang *mas*. Sudah pasti kurang *mas*. kita harus mempersiapkan dan melaksanakan program ini hanya berempat, karena itu kita juga akhirnya dibantu oleh pegawai lain kita lakukan bersama-sama. Cuma sebelumnya kita akan memaksimalkan dulu yang ada. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa secara kuantitas, sumber daya yang dikerahkan untuk melakukan program Rumah Pintar Pemilu masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, hal ini dapat menjadi penghambat dalam mendukung kelancaran proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu karena terdapat ketidaksesuaian sumber daya manusia dalam segi kuantitas dengan beban kerja yang harus ditanggung.

5) *Standard Operating Procedure (SOP)*

Sebuah program yang dijalankan oleh instansi harus mempunyai SOP yang jelas. SOP menjadi sebuah acuan dan pedoman bagi penyelenggara program dalam melaksanakan sebuah program agar penyelenggara mengetahui apa yang harus dilakukan dan disiapkan dalam merealisasikan program Rumah Pintar Pemilu. SOP dibuat selaras dengan terwujudnya sebuah program. Dalam hal ini KPU Kota Batu belum membuat SOP untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Saifudin Zuhri selaku Komisioner

KPU Kota Batu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“Dalam menyelenggarakan program Rumah Pintar Pemilu, kami masih menggunakan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu. Sampai saat ini belum ada SOP.” (Hasil wawancara pada tanggal 26 Februari 2018, pukul 13.30 WIB)

Selain itu informasi lain juga diberikan oleh Bapak Ariansyah Mustafa, S.IP selaku Kassubag Teknis dan Hupmas KPU Kota Batu yang mengatakan bahwa:

“Belum ada SOP *mas*. kami hanya menerapkan standar pelayanan umum dimana orang bertanya kami layani. Seperi yang saya lakukan kepada anda” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program Rumah Pintar Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu belum mempunyai SOP. Oleh sebab itu, dengan tidak adanya SOP dalam program ini membuat implementasi program Rumah Pintar Pemilu menjadi terhambat.

C. Pembahasan

Pada pembahasan ini, uraian lebih ditekankan pada pemaparan tentang temuan-temuan berdasarkan data fokus penelitian dari implementasi program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih yang kemudian ditafsirkan sesuai dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun, analisis tentang implementasi program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya

Pendidikan untuk Pemilih milik KPU Kota Batu

a. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam proses implementasi program. Pada tahapan ini, kegiatan yang akan ditinjau meliputi pertama, pemahaman dan konsistensi tujuan. Kedua, mengenai sosialisasi program Rumah Pintar Pemilu. Widodo (2010:90) mengatakan aktivitas tahap interpretasi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami apa menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Maka dari itu pembahasan pada tahap ini lebih difokuskan pada analisa teoritis terhadap hasil penelitian dari kedua kegiatan tersebut. Adapun pembahasan dari masing-masing kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

1) Pemahaman dan Konsistensi Tujuan

Rumah Pintar Pemilu adalah inovasi program yang dibuat oleh KPU RI dan melalui surat edaran no. 54/KPU/I/2017 tentang pembentukan Rumah Pintar Pemilu tahun 2017 yang menginstruksikan bahwa Rumah Pintar Pemilu dibentuk di 15 (lima belas) KPU Provinsi/KIP Aceh dan 273 KPU/KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Dari 273 KPU/KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia salah satunya adalah KPU Kota Batu. KPU Kota Batu sebagai penyelenggara harus memahami lebih dulu mengenai program Rumah Pintar Pemilu ini.

Berdasarkan pemahaman dan konsistensi tujuan mengenai Rumah Pintar pemilu dari pihak KPU Kota Batu dapat disimpulkan bahwa pertama Rumah Pintar Pemilu adalah konsep pendidikan kepemiluan dan demokrasi dengan pemanfaatan ruang yang ada di KPU Kota Batu. Kedua, Rumah Pintar Pemilu harapannya untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketiga, harapannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi. Keempat, untuk menjadi program Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat informasi kepemiluan.

Berdasarkan pemahaman dan konsistensi tujuan yang dipaparkan oleh pihak KPU Kota Batu apabila dibandingkan dengan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan tujuan yang ada sudah selaras. Dalam arti lain KPU Kota Batu untuk menyelenggarakan Rumah Pintar Pemilu sudah memahami fungsi dari Rumah Pintar Pemilu dan tujuan yang akan dicapai melalui program Rumah Pintar Pemilu.

2) Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi program termasuk ke dalam tahap interpretasi yang telah dijelaskan oleh Widodo (2010:90) tahap interpretasi diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan atau program tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan maupun program

yang diimplementasikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus disosialisasikan agar supaya masyarakat mengetahui dan memberikan dukungan terhadap proses implementasi dari sebuah kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, sosialisasi untuk program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu juga diperlukan dalam rangka memperoleh dukungan dan diketahui oleh publik terutama masyarakat dan sekaligus juga untuk wujud tanggung jawab dan keterbukaan atas upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Batu dalam meningkatkan pendidikan kepemiluan dan demokrasi bagi para pemilih.

Adapaun dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi untuk program Rumah Pintar Pemilu yang telah dilakukan oleh KPU Kota Batu adalah pertama melakukan *launching* program Rumah Pintar Pemilu yang dilakukan pada tanggal 13 September 2017. Acara ini turut dihadiri oleh beberapa siswa dari beberapa sekolah yang undang oleh KPU Batu, selanjutnya hadir Bapak Walikota Batu saat itu Bapak Eddy Rumpoko, hadir juga Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Bapak Gogot Cahyo Baskoro, dan seluruh anggota KPU Kota Batu. Kedua, sosialisasi dilakukan melalui agenda rutin KPU Kota Batu yaitu *KPU Go To School*. Dalam agenda *KPU Go To School*, KPU Kota Batu datang ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pemilu sekaligus memberi gambaran umum cara mencoblos, setelah itu KPU Kota Batu menginformasikan kepada para siswa kalau ada yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kepemiluan dan demokrasi dipersilahkan datang

ke Rumah Pintar Pemilu. Ketiga, sosialisasi yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi seperti lewat media sosial yang berkembang saat ini seperti *twitter*, *facebook*, *youtube* dan *website* KPU Kota Batu.

Setelah dilaksanakan sosialisasi yang dilakukan ternyata tidak semua masyarakat mempunyai antusias yang baik terhadap program Rumah Pintar Pemilu. Widodo (2010:91) mengatakan kebijakan maupun program perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap program tadi. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran program, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung dan bahkan mengikuti pelaksanaan program tadi. Apabila disandingkan dengan teori tersebut dengan kenyataan di lapangan maka sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Batu walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin tetapi masih terdapat masyarakat yang berada disekitar KPU Kota Batu belum mengetahui akan adanya Rumah Pintar Pemilu selain itu juga respon masyarakat yang masih minim membuat program ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat, sangat disayangkan karena pengetahuan kepemiluan dan demokrasi penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian adalah tahapan lanjutan yang dilakukan setelah tahapan interpretasi. Pada tahap ini Widodo (2010:91) mengatakan kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakannya, dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana, penetapan tata kerja (juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu pembahasan pada tahap ini lebih difokuskan pada analisa teoritis terhadap hasil penelitian dari beberapa kegiatan. Adapun pembahasan yang ditinjau dari masing-masing kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

1) Pelaksana Program

Pelaksana kebijakan sangat tergantung kepada jenis program yang akan dilaksanakan. Widodo (2010:91) mengatakan setidaknya pelaksana kebijakan dapat diidentifikasi sebagai berikut : (1) Dinas, badan, kantor, unit pelaksana (UPT) di lingkungan pemerintah daerah; (2) sektor swasta; (3) lembaga swadaya masyarakat (LSM); (3) komponen masyarakat. Berdasarkan pernyataan tersebut pada program Rumah Pintar Pemilu di Kota Batu pelaksana yang diidentifikasi adalah KPU Kota Batu.

Hal terkait dengan implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih, KPU Kota Batu merupakan pelaksana yang bertanggung jawab atas program tersebut sesuai dengan Surat Edaran No. 86/HM.03.5-SD/06/KPU/I/2018 yang didalamnya terdapat isi yang menyebutkan bahwa diinstruksikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembentukan Rumah Pintar Pemilu. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan KPU Kota Batu mengatakan bahwa aktor yang terlibat dalam pendidikan pemilih adalah Pemerintah Kota Batu, Partai Politik, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan pendidik. Berbeda dengan pendidikan pemilih yang menjalani Rumah Pintar Pemilu adalah KPU Kota Batu sendiri.

Namun pada kenyataannya tidak mungkin menjalankan sebuah program tanpa bantuan dari pihak eksternal, dan permasalahan yang ada KPU Kota Batu belum berkoordinasi dengan pihak eksternal lain karena masih mengembangkan konsep. KPU Kota Batu berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti sekolah, hanya saat menjelang *launching*. Seperti yang dikatakan oleh Widodo (2010:92) Penetapan pelaku bukan sekedar menetapkan lembaga mana yang melaksanakan tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari pelaku kebijakan tersebut. Berdasarkan pemaparan yang ada apabila disandingkan dengan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan program ini adalah KPU Kota Batu. Namun

seharusnya KPU Kota Batu membangun komunikasi atau berkoordinasi dengan aktor yang terlibat dalam pendidikan pemilih dalam mengembangkan program Rumah Pintar Pemilu. Seperti yang tertuang pada PKPU No. 10 Tahun 2018 yang didalamnya terdapat isi mengenai peran pemerintah daerah untuk wajib memberikan bantuan dan fasilitas dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi seakan KPU Kota Batu masih fokus untuk mengembangkan konsep dalam lingkungan internal. Selain itu, apabila ditinjau dari segi sasaran sesuai dengan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu yang mengatakan bahwa program ini mencakup seluruh kelompok sasaran, namun pada kenyataannya seperti yang sudah dijelaskan pada penyajian data yang menjadi sasaran dalam program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu hanya kepada pemilih pemula belum menyentuh seluruh segmen dari kelompok sasaran yang semestinya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu yang diidentifikasi adalah bagaimana KPU Kota Batu sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan aktor lain yang bertanggung jawab dalam pendidikan pemilih, KPU Kota Batu hanya berkoordinasi dengan aktor lain hanya saat mengundang ke acara *launching* Rumah Pintar Pemilu. Pengkoordinasian yang dilakukan KPU Kota Batu masih jauh dari kata baik, sebagaimana seharusnya sebelum program ini berjalan seharusnya sudah berkoordinasi

dengan aktor lain agar dapat mencapai tujuan secara bersama-sama dan dari segi sasaran KPU Kota Batu belum dapat memberikan program Rumah Pintar Pemilu kepada seluruh segmen sasaran yang tertuang pada Buku Pendidikan Pemilih.

2) *Standard Operating Procedure (SOP)*

Proses implementasi suatu program harus ditunjang dengan ketersediaan pedoman pelaksanaan karena hal ini akan digunakan oleh pelaksana sebagai acuan bertindak dalam mengimplementasikan program tersebut. Widodo (2010:92) mengatakan bahwa setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *standard operating procedure (SOP)* sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan dilakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini juga didukung oleh pernyataan oleh Bapak Gogot Cahyo Baskoro selaku Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur (dalam *website KPU Kota Blitar*) mengatakan dalam Rapat Pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur bahwa, “nantinya di tiap-tiap KPU Kabupaten/Kota ada *Standrad Operasional Procedure (SOP)* terkait pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan Rumah Pintar Pemilu, sehingga Rumah Pintar Pemilu dapat berfungsi secara maksimal dari waktu ke waktu dan seluruh segmen pemilih bisa memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu tersebut untuk memperoleh pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi”.

Namun keadaan yang ada dilapangan berdasarkan wawancara terdapat perbedaan dengan teori diatas. Bahwa yang terjadi dilapangan KPU Kota Batu hanya mengikuti Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu untuk mengimplementasikan program ini dan belum membuat SOP seperti yang diminta oleh Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur. Widodo (2010:109) menjelaskan bahwa dengan SOP yang jelas maka semakin memudahkan para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik menyangkut tujuan, arah, kelompok, sasaran, dan hasil apa yang dapat dicapai atau dinikmati baik oleh para pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan.

Berdasarkan pemaparan mengenai SOP dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Batu tidak memiliki SOP, hanya mengikuti Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu untuk mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu. Sehingga pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu menjadi berantakan dan tidak dapat maksimal dari waktu ke waktu atau berkelanjutan. Oleh karena itu program ini tidak berfungsi secara maksimal karena belum mempunyai SOP yang jelas dalam organisasi pelaku program.

3) Sumber Daya

Kesuksesan proses implementasi dari suatu program yang sedang berjalan setidaknya didukung oleh tiga macam sumber daya yaitu manusia, keuangan serta sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Erdward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan

bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dengan adanya sumber daya yang memadai maka proses implementasi program dapat berjalan dengan baik. Namun, apabila kondisi menunjukkan hal yang sebaliknya, maka proses implementasi program tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien, meskipun peraturannya telah ditetapkan secara jelas dan konsisten. Oleh karena itu, dalam proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu ini dalam pelaksanaannya juga memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, dan peralatan (sarana dan prasarana).

a) Sumber Daya Keuangan

Para proses implementasi sebuah program, sumber daya anggaran atau keuangan sangat penting untuk menunjang kelangsungan kegiatan operasional. Ketersediaan anggaran menjadi hal yang harus dipertimbangkan terutama terhadap penetapan besaran dan sumber dari anggaran tersebut (Widodo, 2010:92). Selaras dengan hal tersebut, (Widodo, 2010:100) mengatakan terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal ini juga sama seperti halnya dalam proses implementasi program karena jika anggaran yang digunakan terbatas, maka implementasi dari suatu program akan mengalami keterbatasan dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sumber daya keuangan program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu,

bahwa sumber dana yang diterima oleh KPU Kota Batu untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu adalah berasal dari APBN dan selanjutnya diteruskan kepada KPU RI, lalu didistribusikan kepada KPU Kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. KPU Kota Batu menerima anggaran dalam pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu sebesar Rp. 27.000.000. Sebenarnya anggaran untuk Rumah Pintar Pemilu dapat berasal dari tiga sumber yaitu, pertama anggaran dapat bersumber dari APBN seperti yang didapat oleh KPU Kota Batu. Kedua, anggaran dapat bersumber dari dana hibah yang diberikan oleh sektor pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat untuk membantu pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu. Ketiga, anggaran dapat bersumber dari kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan Rumah Pintar Pemilu. Selain itu juga keadaan sumber daya keuangan yang sudah dimiliki oleh KPU Kota Batu masih dianggap kurang untuk melaksanakan program Rumah Pintar Pemilu.

Walaupun seperti itu KPU Kota Batu tetap berusaha menggunakan anggaran yang ada semaksimal mungkin dalam program Rumah Pintar Pemilu. Anggaran yang didapat digunakan untuk pembentukan Rumah Pintar Pemilu, belum cukup apabila ingin mengembangkan Rumah Pintar Pemilu. Dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Batu menerima anggaran dari APBN yang kemudian didistribusikan oleh KPU RI. Sumber anggaran yang ada di KPU Kota

Batu seharusnya tidak hanya dari APBN bila KPU Kota Batu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aktor lain, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan prograam. Kemudian, anggaran yang diberikan kepada KPU Kota Batu ternyata belum cukup untuk mengembangkan program, hanya cukup untuk mewujudkan program Rumah Pintar Pemilu.

Apabila keadaan di lapangan mengenai sumber daya keuangan program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu ditinjau dengan teori yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, anggaran yang dimiliki oleh KPU Kota Batu untuk mengimplementasikan Rumah Pintar Pemilu masih terbatas dan akan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas sehingga berdampak kepada proses implementasi yang tidak berjalan secara maksimal.

b) Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan dan macam sarana dan prasarana yang digunakan juga menjadi salah satu hal yang diprioritaskan untuk menunjang kesuksesan dari sebuah proses implementasi sebuah program. Widodo (2010:92) mengatakan bahwa macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk diketahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan program perlu didukung

oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program.

Sumber daya sarana dan prasarana menjadi hal yang akan menunjang kesuksesan implementasi Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan pemilih, apabila sarana dan prasarana yang ada sudah tersedia dengan baik maka program Rumah Pintar Pemilu akan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat sumber daya sarana yang dimiliki oleh KPU Kota Batu dalam melaksanakan program Rumah Pintar Pemilu sudah sesuai dan terpenuhi seperti di Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi sumber daya prasarana dalam proses implementasi Rumah Pintar Pemilu masih memiliki banyak halangan. Perlu diingat bahwa program ini adalah konsep pemanfaatan ruang. Namun sebenarnya ini menjadi hambatan yang membuat proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu menjadi tidak maksimal. Hal ini dikarenakan KPU Kota Batu sedang fokus untuk mengurus Pilgub 2018, sehingga yang seharusnya Rumah Pintar Pemilu menjadi program prioritas nasional untuk mengedukasi agar partisipasi masyarakat dalam Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 bertambah menjadi terbengkalai. Belum lagi halaman parkir yang ada di KPU Kota Batu dianggap masih kurang memadai apabila ingin

menjalankan program Rumah Pintar Pemilu. KPU Kota Batu harus mempersiapkan terlebih dahulu ruangan yang akan digunakan untuk ruang *audio visual* dan ruang simulasi, hal ini juga akan memakan waktu yang cukup banyak.

Dari pemaparan mengenai sumbu daya sarana dan prasarana yang ada dapat disimpulkan bahwa sarana yang dimiliki oleh KPU Kota Batu sudah baik, namun kendalanya terdapat pada prasarana. Jumlah ruang yang dimiliki KPU Kota Batu masih terbatas, hal ini membuat program Rumah Pintar Pemilu tidak berjalan dengan maksimal sehingga harus adanya penyesuaian jadwal yang jelas untuk menjalankan program ini. Apabila disandingkan dengan teori yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPU Kota Batu untuk mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu belum cukup baik, sehingga dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dari proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan pemilih.

Selain itu, Edward III (dalam Widodo, 2010:102) mengatakan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Berkaitan dengan kurangnya memadainya prasarana yang dimiliki oleh KPU Kota Batu, Edward III (dalam Widodo, 2010:102) mengatakan terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang

efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan. Prasarana yang belum memadai akan membuat program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu dapat menyebabkan tidak efisiensi dan kurangnya motivasi para pelaku program, sehingga dapat menyebabkan gagalnya program.

c) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu adalah pihak pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Pada pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu ini sumber daya yang dikerahkan adalah pegawai dari KPU Kota Batu. Hal ini sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang dimiliki oleh KPU Kota Batu, yaitu meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Sesuai dengan pernyataan dari Widodo (2010:98) yang mengemukakan bahwa penetapan tugas, pokok, dan fungsi beserta kewenangan dan tanggung jawab dari pelaku kebijakan tersebut. Oleh karena itu, atas dasar pendapat tersebut maka KPU Kota Batu ditetapkan sebagai pelaksana yang bertanggung jawab terhadap implementasi program Rumah Pintar Pemilu mengingat program tersebut sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dari KPU Kota Batu. Dengan demikian sumber daya manusia yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu adalah para aparatur KPU Kota Batu.

Widodo (2010:98) mengatakan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Secara umum, kondisi sumber daya manusia di KPU Kota Batu apabila ditinjau dari segi kualitas hampir setengah dari seluruh aparatur menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tingkat S1 (sarjana) yaitu sebesar 13 orang, lalu terdapat 5 orang aparatur yang tingkat pendidikannya sudah S2, selain itu terdapat 1 orang yang tingkat pendidikannya D IV dan sisanya 5 orang menyelesaikan pendidikan terakhir pada tingkat SMA. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas dari aparatur KPU Kota Batu sudah baik dan memadai. Sementara itu, bila ditinjau dari segi kuantitas yang dimiliki oleh KPU Kota Batu dianggap masih kurang. Terlebih lagi untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu yang berada dibawah Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang hanya memiliki 4 personil dalam menjalankan program ini. Masih dianggap kurang memadai apabila dilihat dari segi kuantitas. Oleh karena itu, program Rumah Pintar Pemilu pada akhirnya bisa dilaksanakan dengan bantuan seluruh aparatur KPU Kota Batu bukan saja dari Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Batu.

Berdasarkan seluruh penjelasan, maka dapat diketahui bahwa secara kualitas sumber daya manusia milik KPU Kota Batu tidak terdapat kendala. Namun, secara kuantitas terdapat kendala dimana

antara jumlah sumber daya yang ada dalam Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dengan tugas dalam proses mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu tidak sebanding dengan beban kerja. Widodo (2010:99) yang mengatakan, sekalipun aturan main pelaksanaan kebijakan jelas dengan kebijakan telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu sumber daya manusia masih kurang baik dan dapat membuat proses implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, KPU Kota Batu harus mempertimbangkan kembali tentang sumber daya manusia yang digunakan baik secara kualitas maupun kuantitas agar proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu dapat berjalan secara efektif.

4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Program

Salah satu aspek dalam penetapan manajemen pelaksanaan program yaitu koordinasi antar pihak pelaksana program. Widodo (2010:93) menjelaskan bahwa manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Hal yang berkaitan dengan teori diatas dapat diartikan sebagai yang bertanggung jawab

untuk menjalankan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan maupun program.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih yang mengemban tugas untuk menjalankan Rumah Pintar Pemilu ini adalah Sub Bagian Teknis dan Hupmas yang berada dibawah divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang ada di KPU Kota Batu. Dan koordinasi yang dilakukan masih bersifat prosedural dalam artian sesuai dalam tatanan aturan perundang-undangan yang ada. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat menjadi koordinator untuk menjalankan program sedangkan Sub Bagian Teknis dan Hupmas menjadi eksekutor dalam pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu. Hal ini sudah sesuai dengan tugas dari Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat yang terdapat dalam Rencana Strategis KPU RI tahun 2015-2019 dimana salah satu tugasnya mengenai partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih.

Dengan jumlah personil yang hanya berjumlah 4 orang sehingga harus dibantu aparatur KPU Kota Batu lainnya untuk ikut melaksanakan program Rumah Pintar Pemilu dapat disimpulkan bahwa pola kepemimpinan yang dipakai adalah pola kolegial. Hal ini selaras dengan Widodo (2010:93) yang mengatakan bahwa, apabila pelaksanaan kebijakakn melibatkan dari satu lembaga maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegial, atau ada ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan menjadi pelaksanaan

kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kolegal adalah bersifat teman atau sejawat (sepekerjaan) atau akrab seperti teman sejawat.

Dapat disimpulkan bahwa pola kepemimpinan yang dipakai dalam proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu adalah pola kolegal dimana aktor terlibat yaitu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Batu yang mengkoordinasikan dan Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebagai pelaksana dengan dibantu atau bekerjasama dengan aparatur lain di lingkungan KPU Kota Batu.

5) Jadwal Kegiatan

Penetapan jadwal kegiatan perlu supaya kinerja pelaksanaan program menjadi baik. Widodo (2010:93) menjelaskan jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Hal ini membuat setiap program perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan yang jelas.

Penetapan jadwal kegiatan menjadi hal yang penting karena berhubungan dengan konsep pemanfaatan ruang karena kerap terjadi jadwal yang bersamaan antara ruangan untuk Rumah Pintar Pemilu dan ruangan untuk kerja, untuk itu perlu adanya jadwal kegiatan yang jelas. Namun pada kenyataannya di lapangan program Rumah Pintar Pemilu

belum mempunyai penetapan jadwal yang jelas, sedangkan di dalam Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu pada bagian bentuk pelayanan terdapat kalender *event*. Kalender *event* yang dimaksud adalah bagaimana KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan program Rumah Pintar Pemilu membuat berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung dengan memanfaatkan momentum atau hari peringatan tertentu.

Apabila fakta yang ada dilapangan ditinjau dengan teori yang dipaparkan oleh Widodo sebelumnya dapat disimpulkan bahwa program Rumah Pintar Pemilu belum mempunyai alat ukur kinerja pelaksanaan program karena jadwal kegiatan belum jelas dan tegas, selain itu juga dengan jadwal yang belum jelas akan menimbulkan pandangan bahwa belum adanya konsistensi dari KPU Kota Batu dalam penyelenggaraan program Rumah Pintar Pemilu.

c. Tahap Aplikasi

Aktivitas terakhir dalam mengimplementasikan sebuah program adalah tahap aplikasi, tahap ini merupakan tahap realisasi kegiatan dari program yang telah direncanakan. Widodo (2010:94) menjelaskan bahwa tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun yang akan ditinjau mengenai tahap aplikasi adalah sebagai berikut:

1) Persiapan Program Rumah Pintar Pemilu

Widodo (2010:94) menjelaskan bahwa tahap aplikasi merupakan tahapan penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitasnya. Program Rumah Pintar Pemilu merupakan perwujudan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KKPU RI) No. 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Keputusan tersebut menyatakan visi KPU RI salah satunya adalah berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Untuk mewujudkan visi tersebut misi dari KPU RI adalah dengan meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut persiapan program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu yang pertama adalah dengan menghadiri Rakornas yang diselenggarakan oleh KPU RI supaya mengetahui anggaran, materi, konsep, dan cara pengembangan program Rumah Pintar Pemilu. Selanjutnya hal yang dilakukan adalah dengan rapat koordinasi internal KPU Kota Batu. Setelah itu mulai menyediakan dan menata perlengkapan dan panel-panel informasi tentang demokrasi dan kepemiluan. Berdasarkan hasil penilitan apabila disandingkan dengan teori KPU Kota batu sudah mempersiapkan program Rumah Pintar Pemilu dengan baik.

2) Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu

Setelah melakukan persiapan KPU Kota Batu sudah siap untuk melaksanakan program Rumah Pintar Pemilu. Langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Batu untuk melaksanakan program Rumah Pintar Pemilu pertama dan baru sekali yaitu saat peresmian program pada tanggal 13 September 2017. KPU Kota Batu sudah melakukan yang terbaik untuk membuat peresmian Rumah Pintar Pemilu menjadi menarik, namun sasaran yang telah menerima edukasi dari program ini merasa masih kurang dalam penyampaian yang diberikan oleh KPU Kota Batu. Setelah dilakukan peresmian terdapat tanggapan masyarakat yang merasa biasa saja dan ada juga yang merasa senang.

Adapun alur dari pelaksanaan edukasi yang diberikan dalam program Rumah Pintar Pemilu adalah pertama pengunjung berada di ruang tunggu untuk menunggu giliran, setelah tiba gilirannya pengunjung atau sasaran masuk ke Ruang *audio visual* untuk menonton film mengenai kepemiluan, selanjutnya pengunjung akan masuk ke ruang *display* atau pameran disana terdapat beberapa papan informasi dan buku tentang kepemiluan ataupun demokrasi. Berikutnya pengunjung akan memasuki ruang simulasi untuk mencoba tata cara pencoblosan yang baik dan benar. Terakhir pengunjung akan berdiskusi seputar ilmu yang mereka dapatkan selama menjalani edukasi di Rumah Pintar Pemilu ini di dalam ruang diskusi.

Selain itu hal yang menjadi permasalahan pada tahap aplikasi adalah program Rumah Pintar Pemilu ini baru dijalankan oleh KPU Kota Batu satu kali saja bertepatan dengan peresmian program Rumah Pintar Pemilu. Program ini sudah berjalan selama kurang lebih 5 bulan namun hanya satu kali KPU Kota Batu merealisasikan program ini. Sesuai dengan Surat edaran 86/Hm.03-5SD/06/KPI/I/2018 menyatakan bahwa Rumah Pintar Pemilu adalah program prioritas nasional. Menurut KBBI program prioritas terdiri dari dua kata yaitu program yang berarti rancangan mengenai asas serta usaha, sedangkan prioritas adalah yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Program prioritas dapat diartikan sebagai rancangan usaha yang diutamakan. Program prioritas nasional adalah rancangan usaha yang diutamakan berskala nasional. Berkaitan dengan hal tersebut seharusnya program Rumah Pintar Pemilu lebih diutamakan untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik pada pemilu 2018 dan pemilu 2019. Hal ini menggambarkan bahwa pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Kota Batu melalui program Rumah Pintar Pemilu tidak dapat dikatakan sebagai program yang berkesinambungan, sedangkan pada Buku Pedoman Pendidikan Pemilih mengatakan bahwa salah satu prinsip dari pendidikan pemilih adalah berkesinambungan.

Berdasarkan kedua hal yang ditinjau diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari segi persiapan yang dilakukan oleh KPU Kota Batu sudah baik untuk mewujudkan program Rumah Pintar Pemilu.

Sedangkan apabila dilihat dari segi pelaksanaan program KPU Kota Batu masih kurang dalam merealisasikan program Rumah Pintar Pemilu. Berdasarkan pernyataan tersebut apabila disandingkan dengan teori Widodo (2010:94) yang mengungkapkan bahwa tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya KPU Kota Batu sudah baik dalam persiapan namun belum dapat menjalankan program Rumah Pintar Pemilu dengan baik. Apabila program sudah mempunyai persiapan yang matang namun, dalam realisasinya tidak berjalan maka akan percuma tujuan yang akan ditujukan kepada sasaran tidak tersampaikan dengan baik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya Pendidikan untuk Pemilih milik KPU Kota Batu

Program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu dalam mengimplementasikannya dipengaruhi oleh faktor yang sifatnya mendukung maupun menghambat jalannya proses implementasi tersebut. Pada pembahasan ini dijelaskan mengenai faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu.

a) Faktor Pendukung

1) Faktor Teknologi

Faktor pendukung yang dimiliki oleh KPU Kota Batu dalam mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu adalah teknologi. Berdasarkan penelitian lapangan faktor teknologi menjadi sebuah sarana yang digunakan oleh KPU Kota Batu untuk mendukung proses sosialisasi program Rumah Pintar Pemilu. Selain itu juga KPU Kota Batu sedang menggarap trobosan mengenai program Rumah Pintar Pemilu dengan membuat *e-RPP*. Teknologi juga dapat membantu KPU Kota Batu dalam mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu untuk menyampaikan materi atau mengedukasi kepada para pengunjung. Hal ini sejalan dengan pengertian teknologi menurut Miarso (2007:62) yang mengatakan bahwa teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan sesuatu produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian internal dari suatu sistem.

Apabila kenyataan lapangan ditinjau dengan teori yang dikemukakan oleh Miarso dapat disimpulkan bahwa teknologi menjadi nilai tambah untuk KPU Kota Batu dalam mensosialisasikan dan penyampaian edukasi kepada pengunjung agar tujuan dari terbentuknya Rumah Pintar Pemilu dapat tercapai dengan baik.

2) Faktor Materi Rumah Pintar Pemilu

Faktor lain yang mendukung proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Batu adalah faktor materi Rumah Pintar Pemilu. Materi yang dimaksud disini adalah bahan edukasi yang akan diberikan kepada pengunjung. Materi yang ada dalam program Rumah Pintar Pemilu sebagian besar diberikan oleh KPU RI karena bersifat umum atau nasional. KPU RI memberikan materi kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota sebagai wujud dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang didalamnya mengatakan adanya kelompok pelayanan jasa misalnya pendidikan.

Dalam KBBI materi diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bahan. Hal ini berjalan lurus dengan program Rumah Pintar Pemilu dimana bahan yang sudah ada untuk disampaikan kepada pengunjung hanya tinggal dikemas oleh KPU Kota Batu. Sedangkan KPU Kota Batu hanya menyiapkan membuat materi lokal mengenai pemilu di Jawa Timur dan tentu juga di Kota Batu.

b) Faktor Penghambat

1) Faktor Anggaran

Anggaran menjadi hal lain yang sangat menentukan bagi kelancaran implementasi program Rumah Pintar Pemilu karena ketersediaannya sangat dibutuhkan untuk mendukung dan membiayai proses optimalnya implementasi program Rumah Pintar Pemilu sangat

bergantung pada ketersediaan anggaran yang dimiliki KPU Kota Batu. Namun jika sebaliknya, maka proses implementasi dari program tersebut akan menuai hambatan.

Selama ini anggaran yang diterima untuk program Rumah Pintar Pemilu yang diberikan oleh KPU RI sebesar Rp. 27.000.000. Adapun sebenarnya jumlah tersebut menunjukkan nominal yang besar, namun jumlah tersebut dapat dikatakan belum memadai dan memenuhi kebutuhan dalam mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu. Belum memadainya anggaran tersebut dikarenakan kurangnya sumber pendapatan untuk program Rumah Pintar Pemilu milik KPU Kota Batu karena hanya mengandalkan anggaran yang diberikan oleh KPU RI.

Secara teori, adanya keterbatasan pada sumber daya anggaran tersebut dapat mempengaruhi proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu karena sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2010:100) terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Selaras dengan hal tersebut Widodo (2010:101) mengatakan bahwa terbatasnya sumber daya keuangan (anggaran), akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, anggaran terbatas yang dimiliki oleh KPU Kota Batu dalam mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu akan menyebabkan kualitas pelayanan pada publik menjadi terbatas.

2) Faktor Prasarana

Ketersediaan ruangan merupakan salah satu sumber daya prasarana yang digunakan untuk menunjang implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu. Ruangan penting karena program Rumah Pintar Pemilu merupakan program pendidikan yang dilakukan oleh KPU Kota Batu sehingga diperlukannya ruang belajar untuk menjalankan program tersebut. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu proses kegiatan edukasi tidak memiliki ruangan yang layak atau bahkan tidak memiliki ruangan.

Kenyataan yang terjadi dalam implelementasi program Rumah Pintar Pemilu apabila ditinjau dari segi ruangan adalah ruangan yang dipakai untuk *audio visual* juga sebagai ruangan kantor, selain itu ruang simulasi dan diskusi juga sebagai aula yang dipakai untuk rapat. Apabila dilihat dari konsep Rumah Pintar Pemilu yaitu pemanfaatan ruangan yang ada di KPU Kota Batu. Namun hal ini akan menjadi penghambat bagi proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu. Belum terdapatnya jadwal untuk menjalankan program ini membuat fungsi ruangan yang digunakan belum tertata dengan jelas, kapan harus digunakan untuk ruang kerja dan kapan harus digunakan untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu. Edward III (dalam Widodo, 2010:102) mengatakan terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam

melaksanakan kebijakan. Oleh sebab itu, ketersediaan ruangan merupakan sumber daya prasarana yang menjadi penghambat dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu karena ruangan yang multifungsi belum memiliki jadwal yang jelas akan membuat kurangnya efisiensi dan kurangnya motivasi KPU Kota Batu untuk melaksanakan program Rumah Pintar Pemilu.

3) Faktor Kurang Antusias Masyarakat

Masyarakat adalah sasaran yang akan diberikan edukasi dalam program Rumah Pintar Pemilu. Antusias dalam KBBI diartikan sebagai bergairah atau bersemangat. Masyarakat yang antusias akan adanya program yang diberikan pemerintah akan mendorong kesuksesan dan tercapainya tujuan dari program tersebut. Karena antusias akan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sebuah program yang diberikan oleh pemerintah, dengan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah program akan menciptakan komunikasi yang baik dan akan menimbulkan persamaan konsistensi untuk mencapai tujuan.

Penilitan mengenai Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih, masyarakat kurang antusias terhadap program ini dikarenakan kurang mengetahuinya masyarakat mengenai program Rumah Pintar Pemilu dan kurang menariknya program Rumah Pintar Pemilu. Oleh sebab itu, antusias masyarakat menjadi faktor penghambat dalam program Rumah Pintar Pemilu.

4) Faktor Sumber Daya Manusia

Implementasi dari sebuah program harus didukung oleh sumber daya manusia yang menurut Widodo (2010:98) mengatakan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Berdasarkan pernyataan diatas efektivitas program Rumah Pintar Pemilu di Kota Batu tergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kota Batu. Implementasi program harus didukung oleh sumber daya manusia yang cakap dan cukup.

Berdasarkan penelitian lapangan kualitas sumber daya manusia sudah baik namun kuantitas yang dimiliki masih belum cukup. Rumah Pintar Pemilu dijalankan oleh Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Batu yang hanya mempunyai 4 personil. Hal ini menjadikan beban tugas yang ada tidak sesuai dengan jumlah personil yang menjalankan. Sejalan dengan kenyataan di lapangan Widodo (2010:99) mengatakan sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Widodo (2009:98) juga menjelaskan bahwa adanya keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan dari suatu kebijakan karena pelaksanaanya tersebut tidak berjalan secara efektif. Oleh sebab itu, kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan

tugas yang diemban dengan jumlah aparatur yang ada tidak sebanding dapat membuat program Rumah Pintar Pemilu menjadi tidak efektif.

5) *Standard Operating System* (SOP)

Bapak Gogot Cahyo Baskoro selaku Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur (dalam *website* KPU Kota Blitar) mengatakan dalam Rapat Pimpinan KPU Provinsi Jawa Timur bahwa, “nantinya di tiap-tiap KPU Kabupaten/Kota ada *Standrad Operasional Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan Rumah Pintar Pemilu, sehingga Rumah Pintar Pemilu dapat berfungsi secara maksimal dari waktu ke waktu dan seluruh segmen pemilih bisa memanfaatkan Rumah Pintar Pemilu tersebut untuk memperoleh pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi”. Pemaparan ini menjadi dasar betapa perlunya SOP dalam melaksanakan program Rumah Pintar Pemilu di setiap KPU Kabupaten/Kota di Indonesia.

Selain itu Widodo (2010:106) mengatakan SOP yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Namun pada kenyataannya dilapangan KPU Kota Batu belum membuat SOP mengenai penyelenggaraan program Rumah Pintar Pemilu. Dengan hal seperti itu membuat implementasi program Rumah Pintar Pemilu menjadi terhambat. Apabila disandingkan dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya SOP akan membuat pelaksana program tidak mengerti dengan jelas untuk bertindak dalam pelaksanaan program dan akan membuat program ini tidak berfungsi secara maksimal

untuk jangka yang panjang. Selain itu dengan tidak adanya SOP membuat program Rumah Pintar Pemilu tidak dapat diukur dengan indikator yang jelas. Oleh sebab itu perlunya SOP untuk memudahkan para pelaksana untuk melaksanakan dan mengetahui apa yang harus dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan bagi pemilih milik KPU Kota Batu, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Penelitian berjudul Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Upaya Pendidikan Bagi Pemilih milik KPU Kota Batu menggunakan fokus sesuai dengan teori Jones dalam Widodo (2010:89), yang terdiri dari tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi.
 - a. Berawal pada tahap interpretasi dari program Rumah Pintar Pemilu. Pada tahap interpretasi KPU Kota Batu sudah memahami dengan baik konsep dan tujuan dari program Rumah Pintar Pemilu namun pada sosialisasi yang dilakukan masih belum menumbuhkan rasa antusias masyarakat terhadap program ini, walaupun KPU Kota Batu sudah berusaha semaksimal mungkin. Adapun program Rumah Pintar Pemilu adalah layanan edukasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan ruang yang ada di KPU.
 - b. Selanjutnya adalah tahap pengorganisasian, pertama adalah KPU Kota Batu yang menjalankan program seharusnya dibantu oleh pihak lain namun KPU Kota Batu belum mengkoordinasikan dengan pihak lain yang terkait dengan pendidikan pemilih. Kemudian, program Rumah

Pintar Pemilu belum mempunyai SOP untuk menjalankan program ini, selanjutnya sumber daya yang digunakan dalam mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu dari segi keuangan, manusia dan sarana prasarana masih kurang memadai. Program Rumah Pintar Pemilu berada pada divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat dan dilakukan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Batu. Dalam mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu belum mempunyai jadwal yang jelas dan tegas untuk mengaplikasikannya program ini.

c. Tahap terakhir adalah tahap aplikasi dimana persiapan yang dilakukan untuk mewujudkan atau menciptakan program Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu sudah baik. Dan tahap implemementasi terakhir adalah bagaimana mengaplikasikan program tersebut kepada masyarakat. KPU Kota Batu hanya melakukan pengaplikasian program Rumah Pintar Pemilu hanya satu kali pada saat *launching* pada bulan September 2017.

2. Dalam mengimpelemntasikan program Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Adapun bentuk dukungan untuk implementasi program Rumah Pintar Pemilu adalah teknologi, karena dengan teknologi yang ada sekarang dapat membantu KPU Kota Batu untuk menyebarluaskan program Rumah Pintar Pemilu ke seluruh Kota Batu dan juga membantu dalam memberikan edukasi kepada pengunjung. Selain faktor pendukung, tentu terdapat juga faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi

program Rumah Pintar Pemilu diantaranya adalah dari faktor anggaran, faktor sumber daya prasarana, sumber daya manusia yang belum memadai, dan SOP yang belum dibuat oleh KPU Kota Batu untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu. Selain itu faktor penghambatnya adalah kurangnya antusias masyarakat terhadap program Rumah Pintar Pemilu.

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa hal yang dirasa menarik dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu yaitu sesungguhnya program dengan konsep pemanfaatan ruang untuk pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik apabila sebelum terciptanya sebuah program tidak diikuti dengan SOP dan penetapan jadwal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka berikut dipaparkan tentang beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu, antara lain:

1. Berdasarkan Widodo (2010), KPU Kota Batu perlu merumuskan dan memperjelas pelaksanaan Rumah Pintar Pemilu dengan membuat SOP dan penetapan jadwal agar aplikasi program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat masalah mengenai ruangan yang dimiliki. Dalam merumuskan SOP dan penetapan jadwal akan lebih baik apabila mengundang atau berkoordinasi dengan para aktor yang terlibat dalam pendidikan memilih agar para aktor mengetahui peran mereka dan mempunyai persamaan pemahaman agar tercapainya tujuan dari program Rumah Pintar Pemilu hal ini didasari oleh Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia No. 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Rencana Strategis KPU tahun 2015-2019, yang mengatur kerjasama dengan pihak eksternal lembaga KPU. Dengan begitu kurang sumber daya manusia juga dapat diantisipasi. Selain itu, berdasarkan peraturan tersebut KPU Kota Batu diharapkan dapat mencari sumber dana seperti hibah dan bekerja sama dengan pihak swasta agar anggaran yang dimiliki untuk program Rumah Pintar Pemilu bertambah, dengan begitu akan dapat menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, seperti membuat program Rumah Pintar Pemilu menjadi lebih menarik agar masyarakat antusias untuk datang ke Rumah Pintar Pemilu, lalu mungkin dapat membuat bangunan baru dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki oleh KPU Kota Batu yang cukup luas.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa tugas, pokok, dan fungsi dari partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik dan memberikan pendidikan politik lebih jelas dibandingkan dengan KPU yang secara garis besar diberi tugas untuk menyelenggarakan pemilu. Apabila program Rumah Pintar Pemilu ada hanya sebagai bentuk perwujudan dana anggaran pendidikan pemilu milik KPU Kota Batu lebih baik program ini dihentikan saja, karena tidak memiliki implementasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistika Kota Batu. 2017. *Kota Batu Dalam Angka 2017*. Batu: BPS Kota Batu.
- Badan Pusat Statistika Kota Batu. *Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Batu, 2016*. (<https://batukota.bps.go.id/statictable/2018/01/18/43/jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-di-kota-batu-2016.html>, diakses pada 17/3/2018)
- Bachtiar, Farahdiba. 2014. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*. Makasar. Jurnal Politik Profetik FISIP UNHAS. Vol. 3, No. 1
- Creswell John.W. 2016. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Endrasta, Spica. *KPU Kota Batu Launching Rumah Pintar Pemilu*. (<https://etabloidfbi.wordpress.com/daerah-2/kpu-kota-batu-launching-rumah-pintar-pemilu/>, diakses pada 17/11/2017)
- Harian Haluan. 2017. *KPU Persiapkan Rumah Pintar Pemilu*. (<https://www.harianhaluan.com/news/detail/64393/kpu-persiapkan-rumah-pintar-pemilu>, diakses pada 20/11/2017)
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Islam, Fata Fikrul. 2013. *Implementasi Program Hutan Desa Untuk untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang.
- Kemendikbud. 2016. *KBBI Daring*. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 27/3/2018)

Keputusan KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tentang “Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Privinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KPU Kota Batu. 2017. *Sambutan Wali Kota Batu pada Peresmian RPP Wisata Demokrasi*. (<http://kpu-kotabatu.go.id/sambutan-wali-kota-batu-pada-peresmian-rpp-wisata-demokrasi/>, diakses pada 7/11/2017)

KPU Kota Blitar. 2017. *Rumah Pintar Pemilu Merupakan Salah Satu Program Prioritas dalam Pendidikan Pemilih*. (<http://kpu.blitarkota.go.id/detailpost/rumah-pintar-pemilu-rpp-merupakan-salah-satu-program-prioritas-untuk-pendidikan-pemilih>, diakses pada 15/4/2018)

KPU RI. 2015. *Buku Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KPU RI. 2017. *Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Miarso, Yusufhadi. (2007). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta :Kencana

Moenir. 2015. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pujiati, Astri Dewi. 2017. *Implementasi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan Kepanjen*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Malang .

Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

- Sinambela, dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analaisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno. 2014. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Zauhar, Soesilo. 1993. *Administrasi Program dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP Malang.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

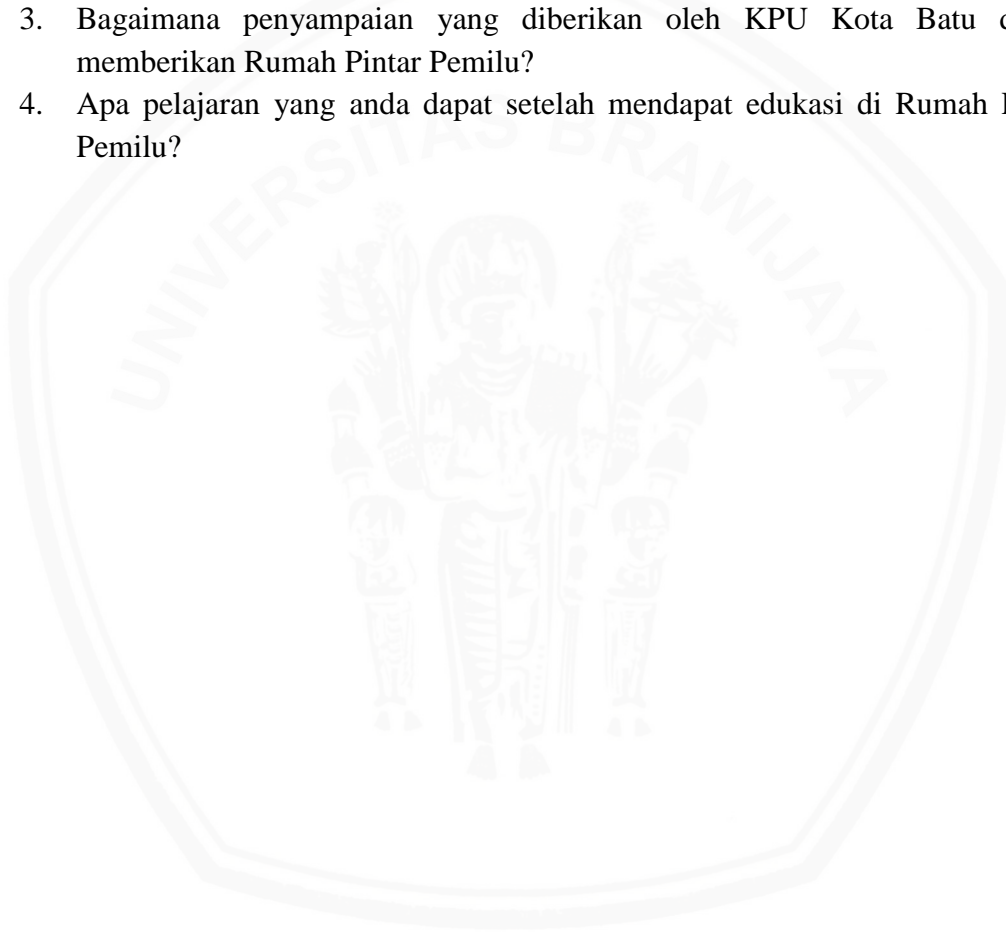
KPU Kota Batu:

1. Bagaimana KPU Kota Batu mensosialisasikan program Rumah Pintar Pemilu?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat setelah mendapatkan sosialisasi mengenai Rumah Pintar Pemilu?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu dan apa peran pihak yang terlibat?
4. Bagaimana koordinasi antara pihak yang terlibat dalam implementasi program Rumah Pintar Pemilu?
5. Apakah Rumah Pintar Pemilu memiliki SOP yang jelas?
6. Apakah pedoman pelaksanaan dari program Rumah Pintar Pemilu?
7. Apakah aktor yang berperan dalam program Rumah Pintar Pemilu sudah mengerti tugas yang diberikan?
8. Darimanakah sumber dana untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu?
9. Apakah dana yang diberikan kepada KPU Kota Batu untuk mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu sudah cukup? Kalau belum bagaimana cara mengatasinya?
10. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki KPU Kota Batu untuk program Rumah Pintar Pemilu?
11. Apakah sarana dan prasarana yang ada untuk mengimplementasikan program Rumah Pintar Pemilu sudah tersedia dengan baik?
12. Apa saja materi yang diberikan dalam program Rumah Pintar Pemilu?
13. Berapa sumber daya manusia yang ada untuk menjalankan program Rumah Pintar Pemilu? Apakah sudah cukup? Kalau belum bagaimana cara mengatasinya?
14. Apakah para pelaksana program Rumah Pintar Pemilu sudah kompeten dalam bertugas?
15. Bagaimana koordinasi antara pelaksana dengan aktor lain yang terlibat dalam program Rumah Pintar Pemilu?
16. Apakah kegiatan ini mempunyai jadwal tertentu dalam pelaksanaannya?
17. Setelah mendapatkan edukasi dalam program Rumah Pintar Pemilu, sasaran akan mendapatkan edukasi lain selain program Rumah Pintar Pemilu?
18. Pukul berapa program Rumah Pintar Pemilu beroperasi?

19. Bagaimana alur penyampaian edukasi pada program Rumah Pintar Pemilu?
20. Bagaimana menurut anda, apakah dalam realisasi Rumah Pintar Pemilu sudah berjalan dengan baik, kalau belum bagaimana cara mengatasinya?
21. Apa saja faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung proses implementasi program Rumah Pintar Pemilu ?

Sasaran:

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya program Rumah Pintar Pemilu?
2. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya program Rumah Pintar Pemilu?
3. Bagaimana penyampaian yang diberikan oleh KPU Kota Batu dalam memberikan Rumah Pintar Pemilu?
4. Apa pelajaran yang anda dapat setelah mendapat edukasi di Rumah Pintar Pemilu?



Surat Penelitian di KPU Kota Batu



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2
KOTA BATU

Batu, 05 Pebruari 2018

Nomor : 072/017/422.205/2018
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu
Di -

Batu

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 31 Januari 2018 Nomor : 1494/UN10.F03.11.11/PN/2018 Perihal Ijin Penelitiain, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : YUDHA ADITYA PRATAMA
NIM : 145030101111012
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas/Universitas : FIA/Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Inovasi Rumah Pelayanan Pemilu Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan pengetahuan Tentang Pemilu
Data yang dicari : - Tupoksi rumah pintar pemilu
- Data pemilih tetap
- Jumlah TPS
- dll
Lokasi : - KPU Kota Batu
- Rumah pintar pemilu Kota Batu
Peserta : -
Waktu : 05 Pebruari 2018 s/d 05 Mei 2018

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BATU

SULIYANAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630416-198603 2 017

Tembusan :

→ Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang

Surat Penelitian di SMAN 2 Kota Batu

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 3864/UN10.F03.11.11/PN/2018
Lampiran : -
Hal : Penelitian

Kepada : Yth. Kepala SMA Negeri 2 Batu
Jln. Hasanuddin
Kota Batu

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan penelitian bagi mahasiswa :

Nama : Yudha Aditya Pratama
Alamat : Jl. Candi Badut Gg. 1 No. 11, Blimbing, Malang
NIM : 145030101111012
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat : Administrasi Publik
Tema : Implementasi Rumah Pintar Pemilu
Lamanya : 2 (dua) hari
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 21 Maret 2018

Mengetahui,
an Dekan
Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. Lelvi Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

M : 08

Surat Edaran Pembentukan Rumah Pintar Pemilu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Januari 2018

Nomor : 86/HK.03.5-SD/06/KPU/1/2018
Sifat :
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Pembentukan Rumah Pintar
Pemilu Tahun 2018.

Kepada :
Yth. 1. Ketua KPU/KIP Provinsi
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
(daftar terlampir)
di -
Tempat

Sehubungan Program Prioritas Nasional terkait pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat Pemilu 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU akan membentuk Rumah Pintar Pemilu di 223 (dua ratus dua puluh tiga) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, diinstruksikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembentukan Rumah Pintar Pemilu pada Caturwulan I Tahun 2018 (Januari s/d April).
3. Pembentukan Rumah Pintar Pemilu dapat memperhatikan pedoman rumah pintar pemilu yang dapat dilihat website : www.kpu.go.id.
4. Apabila KPU/KIP Kabupaten/Kota telah membentuk Rumah Pintar Pemilu, dan telah diresmikan diharapkan menyampaikan laporan kepada KPU melalui KPU/KIP Provinsi.
5. Pembentukan Rumah Pintar Pemilu menggunakan anggaran program pendidikan pemilih dengan 2 (dua) Akun yaitu 3364.006.521211 dan 3364.032.532111.
6. Apabila terdapat permasalahan mengenai pembentukan Rumah Pintar Pemilu dapat menghubungi saudara/i. Tedy Irawan : 081381816612 (Wilayah I), Inna Nasyata Laili 0858-11197795 (Wilayah II), dan Lidya 0812-87410718 (Wilayah III) atau dapat menghubungi telepon (021) 31902573 dan email : parmaskpuri@gmail.com.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Ketua

Anel Budiman

Renstra KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2015-2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

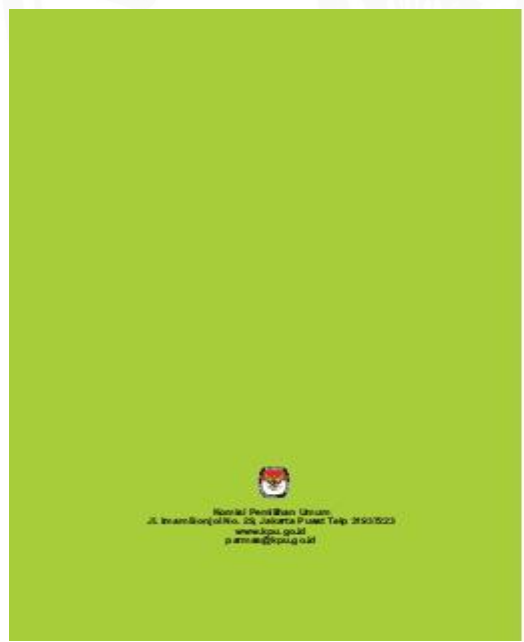
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana



Buku Pedoman Pendidikan Pemilih



Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu



Laporan Pembentukan Rumah Pintar Pemilu

LAPORAN PEMBENTUKAN RUMAH PINTAR PEMILU DAN KEGIATAN FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

A. PEMBENTUKAN RUMAH PINTAR PEMILU DAN KEGIATAN FASILITASI PENDIDIKAN PEMILIH

1. *Dasar Hukum*

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/I/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- h. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/KPU/I/2017 perihal Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017.

2. *Tujuan*

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas project edukasi masyarakat. Pada rumah pintar pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat pemilu membangun gerakan. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan di rumah pintar pemilu. Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi.

Pada fungsi yang lebih luas, konsep rumah pintar pemilu dapat difungsikan menjadi semacam museum pemilu. Konsep rumah pintar pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Rumah pintar pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai

Surat Penamaan dan Pembagian Divisi KPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Agustus 2016

Nomor : 420/KPU/VIII/2016
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penamaan dan Pembagian Divisi
Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Kepada
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penyelarasan divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan penamaan dan pembagian divisi sebagai berikut :

1. Penamaan dan pembagian divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota :
 - a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Administrasi Perkantoran;
 - 2) Kearsipan;
 - 3) Protokol dan persidangan;
 - 4) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - 5) Kerumahtanggaan kantor;
 - 6) Keamanan;
 - 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
 - 8) Logistik;
 - 9) Pengadaan barang dan jasa.
 - b. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Pencalonan;
 - 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - 4) Penggantian Antar Waktu anggota DPRD dan DPD.


Foto Saat Wawancara dengan Bapak Ariansyah Mustafa, S.IP



Foto Saat Wawancara dengan Bapak Saifudin Zuhri



Data Sekolah yang Berkunjung pada *Launching* Rumah Pintar Pemilu

<div>  <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU</p> <p>DAFTAR HADIR PERESMIAN RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) WISATA DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU</p> <p>HARI : RABU TANGGAL : 13 September 2017 PUKUL : 08.30 WIB - Selesai TEMPAT : KANTOR KPU KOTA BATU</p> </div>			
NO	NAMA SEKOLAH	NAMA	TANDA TANGAN
1	KEPALA SEKOLAH SMKN 2 BATU	A. John S.	1
2	SISWA SMKN 2 BATU	Sulistiyowati	2
3		Devi Anggoro Rahuma P.	3
4		Kevin Sumendra	4
5		Rizki Aulia Rahman	5
6	KEPALA SEKOLAH SMKS 17 AGUSTUS BATU	Firda Sandhya Putri	6
7		Muslamet Harjati P.	7
8		Wanda Yurita	8
9		David Febri	9
10	SISWA SMKS 17 AGUSTUS BATU	Selvi Nur	10
11		Khuseinul Soleha	11
12		Ririn Nur	12

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA	TANDA TANGAN
85	KEPALA SEKOLAH SLB EKA MANDIRI BATU	Eko Hari W. S.Pd	85
86	SISWA SLB EKA MANDIRI BATU	Tripti Wili Sero	86
87		Rahma Widiastutik	87
88		Furi Artesta	88
89		Picky Romadhon	89
90	KEPALA SEKOLAH SMAS AL-IZZAH BATU	M. FIRLY Adi	90
91			91
92			92
93			93
94	SISWA SMAS AL-IZZAH BATU		94
95			95
96			96
97			97
98	KEPALA SEKOLAH SMKS MAARIF	Hani Naprilita	98
99		Rasari Putri A.	99
100		Picky Permang P.	100
101		M. NIZAR AMIRUL H	101
102	KEPALA SEKOLAH SMAN 2 BATU	DIDI	102
103			103
104		RENZA AGASTHA M	104
105		MALISA ANGGAENI	105
106	SISWA SMAN 2 BATU	Rifa Ardita B.	106
107		Septha Nanda Setyaningrum	107
108		Sufahmi Anggerheni	108